

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DI KABUPATEN
LAMANDAU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains**

Disusun Oleh :

ARITUA BONAR NAINGGOLAN

NIM.018788031

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2014**

Abstract

THE ORGANIZATIONAL POLICY IMPLEMENTATION AND WORK PROCEDURES OF REGIONAL AGENCY FOR DISASTER MANAGEMENT IN LAMANDAU REGENCY

Aritua Bonar Nainggolan

16/41957

*Postgraduated Programme
Universitas Terbuka*

The purpose of this Research is for analyze the organizational policy implementation and work procedures of Regional Agency for Disaster Management (BPBD) in Lamandau Regency that the BPBD was form by The Regulation of Lamandau Regency No. 02 Year 2011. The method of this Research is qualitative study, the data collection process is performed by using (1) communication in handling disaster management has been well, (2) documentation, and (3) observation. In this Research, the results and discussion are (1) there are lack of communication in the management of disaster (2) inadequate resources (3) in the implementation of the disposition / attitude of bureaucracy, there are the real barriers to the implementation of the policy, (4) The organizational structure has been ideal fit with legislation. Conclusions obtained in this Research were (1) Based on the results of research on the communication factor BPBD Lamandau District has excellent views of the fulfillment of the three indicators of the success of the communication variables, namely transmission, clarity and consistency (2) there is still a shortage of available power source (3) in the implementation of the disposition / bureaucratic attitudes there are real barriers to the implementation of the policy due to the lack of human resources at district BPBDs Lamandau so the policy implementation is not optimal and (4) Organizational Structure and Work Procedure BPBDs Lamandau District is in conformity with the legislation in force and does not need to be changed.

Keywords : Quality Improvement of BPBD in Lamandau Regency

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LAMANDAU

ARITUA BONAR NAINGGOLAN

Universitas Terbuka

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dalam organisasi dan tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau, dimana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan (1) wawancara dimana narasumber yang diwawancara adalah Kepala Pelaksana BPBD sampai dengan pelaksana Pada BPBD Kabupaten Lamandau, (2) dokumentasi dan (3) observasi. Dalam penelitian ini terdapat hasil dan pembahasan (1) komunikasi dalam penanganan penanggulangan bencana sudah baik, (2) Sumber daya yang kurang memadai (3) pelaksanaan disposisi / sikap birokrasi terdapat hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan, (4) Struktur organisasi sudah ideal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini adalah (1) Berdasarkan hasil penelitian faktor komunikasi pada BPBD Kabupaten Lamandau sudah baik dilihat dari terpenuhinya tiga indikator keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi (2) masih terdapat kekurangan sumber Daya yang ada (3) dalam pelaksanaan disposisi / sikap birokrasi terdapat hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan dikarenakan kurangnya SDM pada BPBD Kabupaten Lamandau sehingga pelaksanaan kebijakan tidak maksimal dan (4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak perlu dilakukan perubahan.

Kata Kunci : Peningkatan Kualitas BPBD Kabupaten Lamandau

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LAMANDAU"** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip

maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Nanga Bulik, 01 Juli 2014

Yang Menyatakan



ARITUA BONAR NAINGGOLAN

NIM 018788031

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH DI KABUPATEN LAMANDAU

Penyusun TAPM : ARITUA BONAR NAINGGOLAN

NIM : 018788031

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK (MAP)

Hari/Tanggal : Minggu/24 Agustus 2014

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Agus Sholahuddin, M.Si


Dr. Tita Rosita, M.Pd
NIP. 19601003 198601 2 001

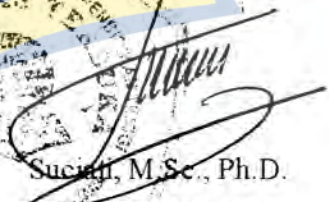
Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu
Program Magister Administrasi Publik

Palangka Raya, September 2014

Direktur Program Pascasarjana,


Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 195910271986031003


Sucini, M.Sc., Ph.D.
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Nama : Aritua Bonar Nainggolan
 NIM : 018788031
 Program Studi : Magister Administrasi Publik (MAP)
 Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TATA
 KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
 DAERAH DI KABUPATEN LAMANDAU

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pasca Sarjana, Program Studi Administrasi Publik Universitas Terbuka pada:

Hari / Tanggal : Minggu / 24 Agustus 2014
 Waktu : Pukul 12.20 – 14.20 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM :

Ketua Komisi Penguji :
 Aminuddin Zuhairi, M.Ed, Ph.D

Penguji Ahli :
 Prof. Dr. Sangkala, M.Si

Pembimbing I :
 Prof. Dr. Agus Sholahuddin, M. Si

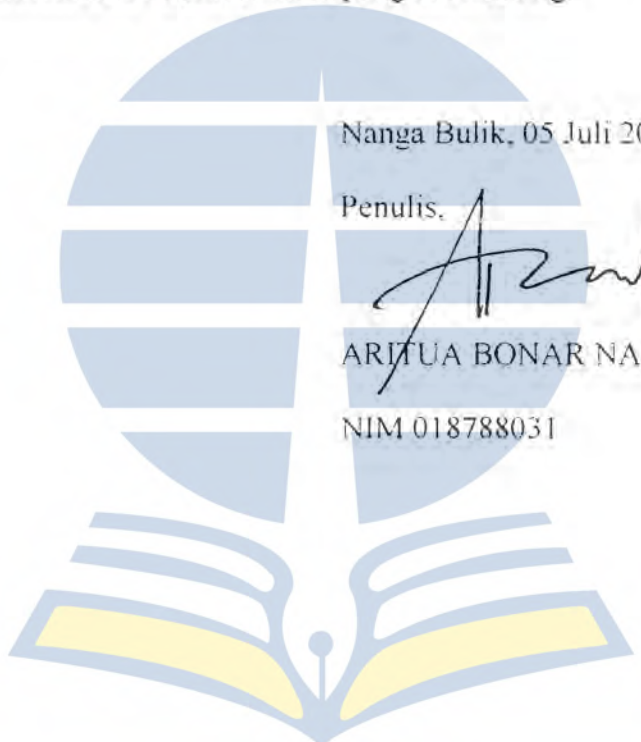
Pembimbing II :
 Dr. Tita Rosita, M. Pd

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas bimbingan dan ijinnyalah tesis berjudul **"IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN LAMANDAU"** telah selesai disusun, tesis ini disusun sebagai syarat untuk mencapai gelar Master (S2) pada Jurusan manajemen administrasi Publik universitas terbuka, penulis menyadari terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, oleh sebab itu, rasa terimakasih yang tidak terhingga dan rasa hormat terdalem kepada banyak pihak dengan tulus penulis sampaikan kepada :

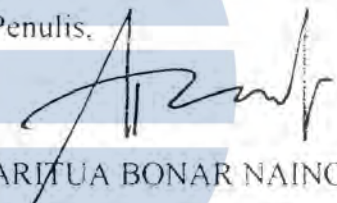
1. Bapak Prof. Dr. AGUS SHOLAHUDIN, M.Si selaku pembimbing I, atas arahan, kritik dan masukannya dalam proses pembimbingan tesis ini.
2. Dr. TITA ROSITA, M.Pd selaku pembimbing II, atas segala arahan, saran dan masukannya dalam proses pembimbingan tesis ini.
3. Kepada Ibu STEFANI atas dorongan dan toleransinya sehingga penulis dan mahasiswa yang lain dapat menyelesaikan tesisnya.
4. Kepada ibunda tercinta Sayang Luper atas kesabarannya dan semangat dalam mendidik anak-anaknya beserta doa yang menjadi penuntun dalam menjalankan hidup.
5. Kepada kekasih Putu Andina Hineni atas dukungan, doa dan pengertiannya sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
6. Kepada teman-teman S-2 Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka semangat berjuang dan selamat atas keberhasilannya.

Semoga kebaikan semua yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian tesis ini mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi siapa saja yang memerlukan serta mampu menginspirasi untuk meneliti lebih dalam dari apa yang telah terurai. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, karena itu kritik dan saran selalu penulis harapkan sebagai pengembangan tesis ini ke depan. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan pengembangan bagi ilmu Manajemen Administrasi Publik di masa yang akan datang.



Nanga Bulik, 05 Juli 2014

Penulis,



ARITUA BONAR NAINGGOLAN

NIM 018788031

RIWAYAT HIDUP

Nama : **ARITUA BONAR NAINGGOLAN**
 NIM : 018788031
 Program Studi : Ilmu Administrasi bidang Minat Administrasi Publik
 Tempat / Tanggal Lahir : Pangkalan Bun, 05 Juli 1986

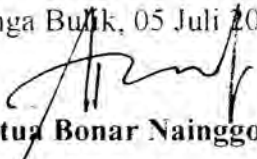
Riwayat Pendidikan :

1. Lulus SD di SDN Raja 6 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1998
2. Lulus SMP di SMPN-1 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2001
3. Lulus SMUN-1 Pangkalan Bun Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2004
4. Lulus S-1 di IPDN, Provinsi Jawa Barat pada tahun 2009

Riwayat Pekerjaan :

1. Tahun 2009 s.d 2014 sebagai pelaksana di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau
2. Tahun 2004 s.d sekarang sebagai Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau

Nanga Bulik, 05 Juli 2014


Aritua Bonar Nainggolan
NIM 018788031

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
RIWAYAT HIDUP.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	128
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori.....	8
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Berfikir.....	27
D. Operasionalisasi Konsep.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian.....	31
B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informasi.....	32
C. Instrumen Penelitian.....	34
D. Prosedur Pengumpulan Data.....	35
E. Metode Analisis Data	36

BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
A.	Deskripsi Objek Penelitian.....	38
B.	Hasil.....	44
C.	Pembahasan.....	111
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan.....	123
B.	Saran.....	124
	DAFTAR PUSTAKA	125
	Lampiran : Transkrip wawancara	



DAFTAR TABEL

No. Tabel		Halaman
1.1.	Data Bencana di Kabupaten Lamandau Tahun 2013.....	4
2.1.	Data Penelitian Terdahulu.....	19
4.1.	Luas Daerah dan Persentase Luas Terhadap Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2012.....	41
4.2.	Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan, dan Banyaknya Desa / Kelurahan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012.....	42
4.3.	Banyaknya Bencana Alam di Kabupaten Lamandau Menurut Peristiwa Tahun 2012.....	42
4.4.	Banyaknya Korban Bencana Alam dan Kerugian di Kabupaten Lamandau Menurut Peristiwa Tahun 2012.....	43
4.5.	Kondisi dan Kualifikasi Pegawai	61
4.6.	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Golongan Ruang (Per April 2014)	62
4.7.	Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau	63
4.8.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2011-2013	73
4.9.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Bidang Pencegahan Dan Kesiapansiagaan Tahun Anggaran 2011-2013	74
4.10.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Bidang Kedaruratan dan logistik Tahun Anggaran 2011-2013	76
4.11.	Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013.....	78

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar		Halaman
2.1	Model Implementasi George C. Edward III	10
2.2	Kerangka Bepikir.....	28
4.1	Peta Kabupaten Lamandau.....	39
4.2	Luas Wilayah (km ²) Tiap Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012	41
4.3	Struktur Organisasi.....	110



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk didalamnya perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Lamandau merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat dimana pembentukannya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180). Dimana pembentukan tentang struktur organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau dengan nilai variabel 58 (lima puluh delapan) berdasarkan pasal 21 ayat (2) yaitu besaran organisasi perangkat daerah dengan nilai antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh) terdiri dari:

1. Sekretariat daerah, terdiri dari paling banyak 3 (tiga) asisten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas paling banyak 15 (lima belas);
4. Lembaga teknis daerah paling banyak 10 (sepuluh);
5. Kecamatan; dan
6. Kelurahan.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi-instansi teknis terkait, seperti dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi, dinas kesehatan, dinas pekerjaan umum, dll. selain itu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2011 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang

Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan pertimbangan perlu adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau dalam menjalankan perannya di pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tentang Penanggulangan Bencana;
5. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah;
6. Melaporkan Penanggulangan Bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
9. Melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; serta
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal 25, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011. Pelantikan para pejabat eselon II, III dan IV dilaksanakan pada tanggal 04 Januari 2011.

Tabel 1.1.
Data Bencana di Kabupaten Lamandau Tahun 2013

No	Jenis Bencana	Jumlah Bencana	Keterangan
1	2	3	4
1	Kebakaran	8	Dilokasi berbeda Berupa kebakaran rumah penduduk
2	Banjir		
3	Tanah Longsor	-	-

No	Jenis Bencana	Jmlh Bencana	Keterangan
1	2	3	4
4	Angin Topan Puting Beliung	2	Rusaknya rumah penduduk
5	Konflik Sosial	-	-
6	Kecelakaan Transportasi	-	-
7	Wabah	-	-

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2011 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan pertimbangan perlu adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau.

Dimana dalam kelembagaannya BPBD Kabupaten Lamandau merupakan satuan kerja perangkat daerah yang masih baru sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil masih harus disempurnakan seiring berjalannya proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Kabupaten Lamandau. sehingga Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas, maka penulis menganggap perlunya dilakukan suatu penelitian mengenai implementasi tentang kebijakan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau, yang

dituangkan ke dalam Thesis dengan judul **“Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau”**.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Bagaimanakah Implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau?
2. Apakah yang menjadi kendala dan pendukung implementasi kebijakan internal dan eksternal?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

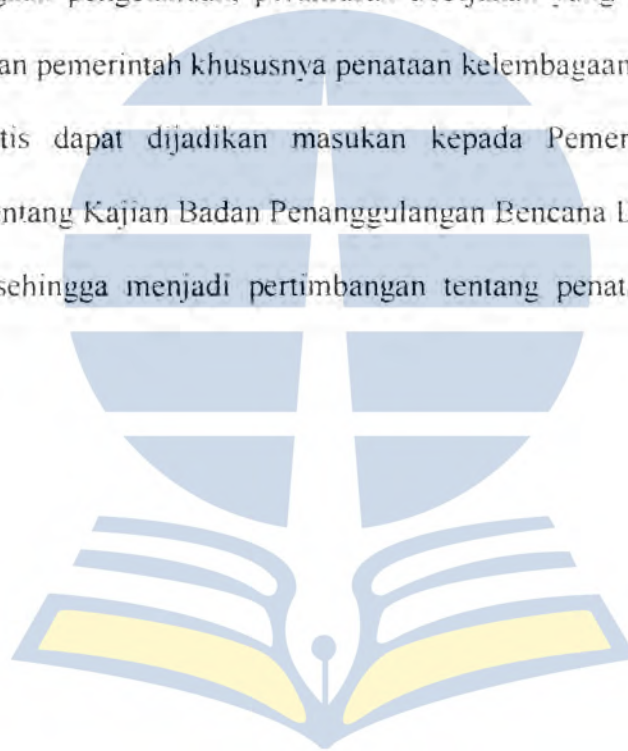
1. Mendeskripsikan dan menganalisis penataan kelembagaan tentang pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau.

2. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang kendala dan pendukung implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis untuk memperkaya terapan ilmu administrasi publik dan untuk mengembangkan pengetahuan, perumusan kebijakan yang berorientasi pada pengembangan pemerintah khususnya penataan kelembagaan.
2. Secara praktis dapat dijadikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau tentang Kajian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau, sehingga menjadi pertimbangan tentang penataan kelembagaan kedepan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

I. Penjelasan Kebijakan Publik

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. dalam prakteknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene Bardach dalam Leo Agustino (2012), yaitu :

“ Adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya dalam kata-kata dan selogan-selogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan lebih sulit lagi untuk

melaksanakannya dalam bentuk cara yang memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.”

Dalam derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implementation and Public Policy* dalam Leo Agustino (2012), mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Pengertian implementasi selain menurut Van Meter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2012), bahwa Implementasi adalah

“tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr. Dalam Leo Agustino (2012) dimana mereka mengatakan bahwa :

“Implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output).”

2. Implementasi Kebijakan Publik

Edward III dalam Leo Agustino (2012) mengajukan pendekatan masalah implementasi dengan terlebih dahulu mengemukakan dua pertanyaan pokok, yakni: (i) faktor apa yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan? dan (ii) faktor apa yang menghambat keberhasilan implementasi kebijakan? Berdasarkan kedua pertanyaan tersebut dirumuskan empat faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan.

Ditegaskan oleh Edward III dalam Leo (2012) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan.



Gambar 2.1. Model Implementasi George C. Edward III

- a. Komunikasi. keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Edward III dalam Leo (2012) mengemukakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- 1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
 - 2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.
 - 3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.
- b. Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut

dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

Menurut Edward III dalam Leo (2012), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salahsatunya disebabkan oleh staf pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- 2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan

secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo (2012) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- d. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Dijelaskan oleh Edward III dalam Leo Agustino (2012) secara singkat bahwa pedoman yang tidak akurat, jelas atau konsisten akan memberikan kesempatan kepada *Implementors* membuat diskresi. Diskresi ini bisa langsung dilaksanakan atau dengan jalan membuat petunjuk lebih lanjut yang ditujukan kepada pelaksana tingkat bawahnya. Jika komunikasi tidak baik maka diskresi ini akan memunculkan disposisi. Namun Komunikasi yang terlampau detail akan mempengaruhi moral dan independensi implementor, bergesernya tujuan dan terjadinya pemborosan sumber daya seperti keterampilan, kreatifitas, dan kemampuan adaptasi. Sumber daya saling berkaitan dengan komunikasi dan mempengaruhi disposisi dalam implementasi. Demikian juga disposisi dari implementor akan mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan komunikasi kebijakan baik dalam menerima maupun dalam mengelaborasi lebih lanjut ke bawah rantai komando.

3. Organisasi

Elu dan Purwanto (2011) berpendapat bahwa organisasi merupakan :

- a. Alat untuk mencapai tujuan
- b. Alat untuk mengorganisasikan sumberdaya
- c. Memiliki batas yang relatif dapat diidentifikasi
- d. Sebagai sistem sosial sehingga dapat berperilaku
- e. Dikoordinasikan secara sadar
- f. Melibatkan lebih dari satu orang

Pertumbuhan dan perkembangan ukuran organisasi semakin luas dan kompleks dilahirkannya pertumbuhan organisasi baru, fluktuasi keanggotaan dan

perubahan teknologi pendukung kegiatan sebagai respon terhadap inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini di Kabupaten Lamandau dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Terdapat beberapa variabel yang merupakan variabel pilihan yang menentukan perubahan organisasi, yaitu :

a. Labour Turnover

Labour Turnover merupakan proses pergantian tenaga kerja yang sering dipakai sebagai variabel tak bebas. Kondisi ini menggambarkan proporsi karyawan yang meninggalkan pekerjaan dalam satu tahun (argyle, Gardner dan Cioffi dalam Liliweri, 1997). Labour Turnover adalah salah satu variabel yang mudah sekali diukur misalnya dengan menghitung karyawan yang pensiun, meninggal dunia, pindah tugas (rotasi dan mutasi), cuti dan karyawan yang beristirahat.

b. Konflik Organisasi

1) Konflik dalam organisasi

Yang dimaksud konflik dalam organisasi adalah konflik yang terjadi dalam tubuh organisasi, yang mana sumber konflik adalah memburuknya hubungan antarpribadi diantara karyawan pada satuan kerja yang sama atau berbeda dalam system organisasi.

2) Konflik antar organisasi

Yang dimaksud konflik antar organisasi adalah konflik yang terjadi diantara organisasi-organisasi yang berbeda.

c. Kelenturan Organisasi

Porte dan Denhart dalam Liliweri (1997) mengemukakan bahwa

“Derajat kelenturan atau fleksibilitas organisasi dapat digambarkan dengan proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan-perubahan dalam organisasi”.

Salah satu kesulitan dalam menentukan tingkat kelenturan organisasi adalah sejauh mana koordinasi diantara satuan kerja dalam organisasi sehingga dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar. Oleh karena itu akibat adanya kelenturan itu sendiri maka setiap organisasi harus memiliki suatu “strong point” agar dia dapat bertahan terhadap perubahan yang melandanya.

d. Pertumbuhan Organisasi

Haire dalam Liliweri (1997) mengartikan pertumbuhan organisasi sebagai pertambahan jumlah karyawan dalam satuan waktu atau periode waktu tertentu. Pertumbuhan organisasi sering kali dikaitkan dengan meningkatnya jaringan komunikasi, pengembangan departemen dan spesialisasi pekerjaan, peningkatan kontrak dengan organisasi lain secara simbolis, pertukaran hubungan dan perluasan sebagian produk baru ke pasar bahkan ke pertambahan kekayaan.

e. Suksesi Administratif

Suksesi administrative merupakan tingkat pergantian diantara para pimpinan administrative dalam suatu organisasi Carlson dalam Liliweri (1997) mengemukakan suksesi administrative tidak bisa ditolak. oleh karena itu semua organisasi harus sepakat dan mendukung proses suksesi atau pergantian para pemegang kunci penting yang berkaitan dengan perkembangan organisasi.

f. Penggunaan alat teknologi termasuk otomatisasi

Sejak teknologi hadir dalam sebuah organisasi, apapun nama teknologi itu (otomatisasi atau mekanisasi) maka para peneliti mulai melihatnya sebagai variabel yang sangat memengaruhi proses dan struktur organisasi khususnya dan perubahan keadaan social pada umumnya. Sejumlah kecil penelitian dalam kondisi-kondisi tertentu telah menemukan bahwa pengaruh teknologi sangat besar terhadap perubahan cara kerja organisasi. misalnya : (1) ada hubungan yang nyata antara teknologi dengan hasil kerja yang diperoleh; (2) terdapat perbedaan implikasi dari beragam teknologi terhadap cara kerja karyawan dalam beragam bidang kegiatan; (3) ada banyak kemungkinan kaitan antara perubahan teknologi dengan perubahan struktur organisasi yang meliputi perubahan atas hirarki kewenangan, rentang kendali, kejelasan dan ketegasan tugas; dan (4) tidak ada satu teori umum tentang perubahan-perubahan teknologi yang bias bertahan, kalau ada jumlah itu dapat dihitung dalam organisasi, karena ada banyak ragam variabel yang berpengaruh terhadap perubahan organisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan penelitian yang kita lakukan tidak sama dengan penelitian yang pernah ada. Penelitian yang terkait dengan Implementasi kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut

Tabel 2.1
Data Penelitian Terdahulu

NO	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	2	3
1	Risno Taweri (2005) Judul : Studi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pendekatan System Dynamics di Kabupaten Buru	1. Struktur model perilaku Organisasi Perangkat Daerah dilihat dari segi kemampuan keuangan daerah a. Sebelum digunakan skenario kebijakan, keadaan kecukupan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun mengalami kemunduran dan menuju keadaan <i>colaps</i> (dana habis) sesudah tahun 2020, hal ini dikarenakan pendapatan diperoleh lebih kecil dari pada belanja. Sedangkan pendapatan daerah sebagian besar tergantung dari pemberian Pemerintah Pusat, yaitu dari Dana Alokasi Umum. b. Setelah adanya skenario kebijakan yang diterapkan, yakni kebijakan pengurangan jumlah organisasi disertai dengan pengurangan jumlah eselonisasi dari jumlah organisasi 35 unit menjadi 22 unit. Kebijakan ini belum mampu untuk menghemat anggaran, tetapi sebaliknya akan mempercepat penurunan kecukupan dana menuju kearah <i>colaps</i> (dana habis) bila dibandingkan dengan kebijakan DAU terbatas. 2. Struktur model perilaku organisasi perangkat daerah dilihat dari segi ketersediaan pegawai a. Sebelum adanya skenario kebijakan, jika DAU tidak terbatas ataupun terbatas, permintaan pegawai baik itu pegawai gol I, II, III semakin meningkat, selain itu promosi pegawai ke jabatan struktural (eselonisasi) semakin sedikit bila dibandingkan dengan jumlah eselon yang ada. b. Setelah ada kebijakan pengurangan jumlah organisasi (perampingan organisasi) dan

NO	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	2	3
		pengurangan eselon, tidak terlalu mempengaruhi kinerja, produktivitas, kualitas, dan motivasi pegawai. Tetapi setelah ada kebijakan peningkatan kualitas dan motivasi pegawai, serta ditunjang dengan peningkatan penurunan belanja, maka kinerja dan produktivitas pegawai, dari tahun ke tahun semakin meningkat ke arah stabil bahkan melebihi stabil, hal ini disertai dengan peningkatan promosi pegawai untuk menduduki jabatan struktural (eselonisasi). 3. Rekomendasi kebijakan yang ditempuh dalam penataan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif, yaitu : Pengurangan jumlah organisasi dan pengurangan eselonisasi yang bertujuan untuk mengefesiensi anggaran, ternyata sebaliknya yaitu memperkecil pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu pengurangan jumlah organisasi (perampingan organisasi) disertai dengan peningkatan kualitas dan motivasi pegawai, serta penurunan pertumbuhan belanja daerah, dalam arti bahwa belanja harus diefesiensi atau sehemat mungkin tetapi memberikan kontribusi yang maksimal kepada pemerintah.
2.	Salim Kamaluddin (2010) Judul : Analisis Implementasi Perda No.15/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah	1. Belum mendukung sepenuhnya implementasi Perda dengan baik akibat dari kesalahan formulasi kebijakannya. 2. Perlu dilakukannya evaluasi untuk direvisi kembali perangkat organisasi daerah sesuai Perda No. 15/2008 baik jumlah dinas maupun jabatan struktural eselon III dan IV untuk diperkecil atau digabungkan.
3.	Anto Riswanto (2002) Judul : "Proses	1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan struktur organisasi pada

NO	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	2	3
	Penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah	pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan standar sebagai suatu proses kebijakan publik. Hasil dari proses penyusunan organisasi perangkat daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah. Meskipun demikian, proses ini tidak dilaksanakan dengan prosedur yang dapat menggambarkan obyektivitas, sistematis, logis dan komprehensif. Tidak adanya tahap pengenalan masalah dan diagnosis terhadap organisasi pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah, menyebabkan proses penyusunan struktur organisasi tersebut tidak dapat memenuhi kriteria untuk mengakomodir segenap permasalahan yang terjadi di dalam organisasi. 2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan struktur organisasi pemerintah (perangkat daerah) Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh aspek kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses itu, pengenalan masalah dan diagnosa organisasional serta dukungan politis dari para stakeholders. Dari aspek kapabilitas sumberdaya manusia (aparatur), terlihat bahwa kemampuan teknis pengorganisasian maupun kemampuan untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah yang dimiliki oleh aparat yang terlibat dalam proses penyusunan struktur organisasi mempengaruhi hasil dari proses tersebut. Sedangkan aspek pengenalan masalah dan diagnosa organisasi sangat diperlukan dalam proses penataan organisasi, karena hal ini menyangkut ketepatan mengenali masalah organisasi, ketepatan strategi yang diterapkan untuk pengembangan organisasi dan juga ketepatan dalam menerapkan model/struktur serta ukuran dan besaran organisasi. Disamping itu, faktor lain yang turut

NO	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	2	3
		mempengaruhi keberhasilan proses penyusunan struktur organisasi pemerintah (perangkat daerah) Kabupaten Lampung Tengah adalah dukungan politis dari para stakeholders yang memadai, baik berupa intervensi kekuasaan, partisipasi stakeholders maupun tingkat konflik yang muncul berkaitan dengan proses penyusunan struktur organisasi pemerintah (perangkat daerah) tersebut. Dalam konteks ini, kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia dan peran serta dari para stakeholders dalam proses penyusunan struktur organisasi pemerintah (perangkat daerah) Kabupaten Lampung Tengah masih sangat rendah, karena dipengaruhi oleh dimensi struktural.
4.	Syaiful Anwar Djamil (2002) Judul : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim)	1. Terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dengan variabel efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terbukti bahwa variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah tepat mempengaruhi peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan oleh variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah terhadap variabel terikatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 71,5 %. 2. Antara variabel restrukturisasi organisasi dengan variabel efektifitas pelaksanaan otonomi daerah terdapat pengaruh yang positif, hal ini terbukti bahwa variabel restrukturisasi organisasi tepat mempengaruhi evektifitas pelaksanaan otonomi daerah dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan oleh variabel restrukturisasi organisasi terhadap variabel terikatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 64,2 %.. 3. Variabel kualitas sumber daya manusia

NO	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	2	3
		aparatur pemerintah daerah dan restrukturisasi organisasi mempunyai pengaruh yang positif terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terbukti bahwa peran variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan restrukturisasi organisasi di Kabupaten Muara Enim yang tepat secara bersama-sama mempengaruhi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan oleh variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dan restrukturisasi organisasi secara bersama-sama terhadap efektivitas pelaksanaan otonomi daerah memberikan kontribusi sebesar 74,3 %.
5.	Prasetyaningsih (2009) Judul : Pengaruh Struktur Organisasi, Kepemimpinan dan Kemampuan SDM Terhadap Efektivitas Pelayanan Pensiortifikatan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal	1. Dilihat dari tabel 4.12 Rekapitulasi variabel struktur organisasi pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal dengan rata-rata 3.68 masuk kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan struktur organisasi pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal berjalan dengan sangat baik. 2. Dilihat dari tabel 4.19 Rekapitulasi variabel kepemimpinan pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal dengan rata-rata 2.88 masuk kategori baik, sehingga dapat disimpulkan kepemimpinan pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal berjalan dengan baik. 3. Dilihat dari tabel 4.26 Rekapitulasi variabel kemampuan SDM pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal dengan rata-rata 2,74 masuk kategori tinggi, sehingga dapat disimpulkan kemampuan SDM pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal telah memenuhi kategori yang baik. 4. Dilihat dari tabel 4.33 Rekapitulasi variabel Efektifitas Pelayanan pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal dengan rata-rata 2.92 masuk kategori Efektif, sehingga dapat disimpulkan Efektifitas Pelayanan pada Kantor Pertanian Kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik.

NO	PENULIS	HASIL PENELITIAN
1	2	3
		5. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara struktur organisasi terhadap efektifitas pelayanan pensertifikatan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. 6. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kepemimpinan terhadap efektifitas pelayanan pensertifikatan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal. 7. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan SDM terhadap efektifitas pelayanan pensertifikatan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal

Pada penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau” Mengemukakan masalah keadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau terkait organisasi dan tata kerjanya dimana masih terdapat berupa permasalahan terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mana tidak terdapat dalam struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Dalam penelitian Risno Taweri (2005) dengan Judul “ Studi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pendekatan System Dynamics di Kabupaten Buru” meneliti tentang :

1. Struktur model perilaku Organisasi Perangkat Daerah dilihat dari segi kemampuan keuangan daerah.

2. Struktur model perilaku organisasi perangkat daerah dilihat dari segi ketersediaan pegawai.
3. Rekomendasi kebijakan yang ditempuh dalam penataan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif

Dalam penelitian Salim Kamaluddin (2010) dengan Judul “Analisis Implementasi Perda No.15/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah” yang mana hasil dari penelitian tersebut yaitu:

1. Belum mendukung sepenuhnya implementasi Perda dengan baik akibat dari kesalahan formulasi kebijakannya
2. Perlu dilakukannya evaluasi untuk direvisi kembali perangkat organisasi daerah sesuai Perda No. 15/2008 baik jumlah dinas maupun jabatan struktural eselon III dan IV untuk diperkecil atau digabungkan.

Dalam penelitian Anto Riswanto (2002) dengan Judul “Proses Penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah” yang mana hasil dari penelitian tersebut yaitu

1. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyusunan struktur organisasi pada pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah dilaksanakan melalui tahapan-tahapan standar sebagai suatu proses kebijakan publik.
2. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan penyusunan struktur organisasi pemerintah (perangkat daerah) Kabupaten Lampung Tengah dipengaruhi oleh aspek kapabilitas sumber daya manusia yang terlibat dalam

proses itu, pengenalan masalah dan diagnosa organisasional serta dukungan politis dari para stakeholders.

Dalam penelitian Syaiful Anwar Djamil (2002) dengan Judul : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim) membahas perbandingan antar variable yaitu :

1. Antara variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dengan variabel Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Antara variabel Restrukturisasi Organisasi dengan variabel Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah.

Dalam penelitian Prasetyaningsih (2009) dengan Judul “Pengaruh Struktur Organisasi, Kepemimpinan dan Kemampuan SDM Terhadap Efektivitas Pelayanan Pensertifikatan Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal” memperhatikan **variable dalam penelitian dengan melakukan rekapitulasi variable seperti : tabel 4.12 Rekapitulasi variabel struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal dengan rata-rata 3,68 masuk kategori sangat tinggi, sehingga dapat disimpulkan struktur organisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal berjalan dengan sangat baik.**

Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang implementasi tentang kebijakan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau.

Yang mana penelitian mencakup :

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pada BPBD Kabupaten Lamandau.
2. kebijakan pemerintah daerah terkait kekurangan sumber Daya yang ada pada BPBD Kabupaten Lamandau.
3. Kebijakan pemerintah daerah terkait kekurangan pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan sehingga hanya beberapa kegiatan yang dapat dilaksanakan.
4. Kebijakan pemerintah dalam pembentukan struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lamandau.

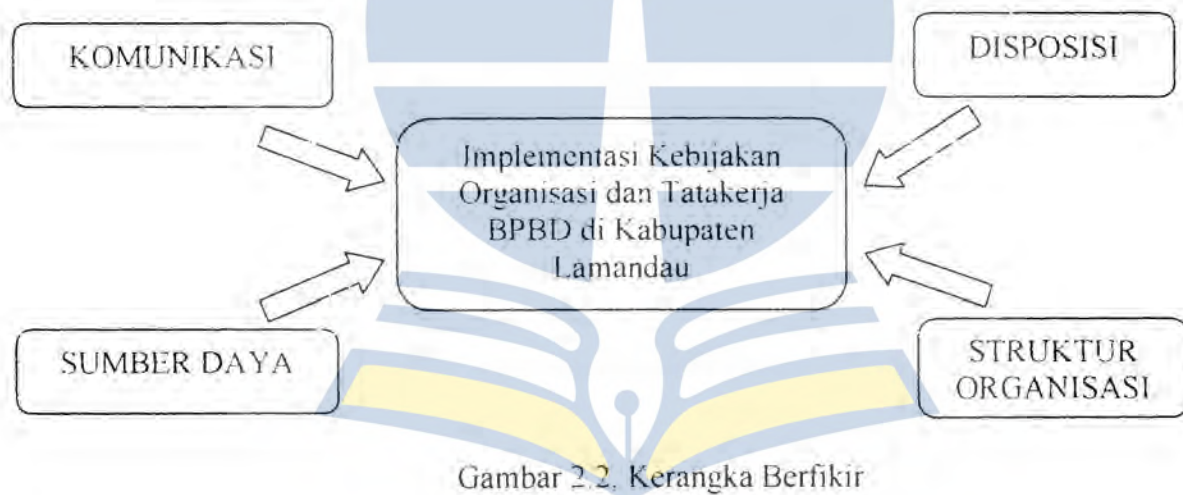
C. Kerangka Berfikir

Kabupaten Lamandau yang merupakan daerah yang baru berdiri selama 10 Tahun dimana terdapat beberapa bencana yang disebabkan oleh alam maupun kesalahan manusia (*human error*), bencana yang disebabkan oleh alam berupa banjir, tanah longsor, kebakaran hutan sedangkan bencana yang disebabkan oleh manusia yaitu kebakaran rumah dan kebakaran lahan.

Sesuai dengan alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal

perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berdasarkan Pancasila, termasuk didalamnya perlindungan atas bencana, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati dan mendeskripsikan implementasi kebijakan organisasi dan tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau. Peneliti akan menguraikan tentang kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah bencana.



Gambar 2.2. Kerangka Berfikir

D. Operasionalisasi Konsep

Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor Manusia sehingga

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

Rekontruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek, kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menghilangkan atau resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan sosial politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini didesain sebagai penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. “Penelitian kualitatif menekankan pada suatu proses, artinya penelitian bermaksud untuk menemukan, memahami, menjelaskan fenomena yang terjadi” (Moleong, 2010). Pendekatan tersebut digunakan dengan pertimbangan:

1. Penelitian kualitatif menyajikan bentuk holistik (menyeluruh) dalam menganalisis suatu fenomena.
2. Penelitian jenis ini lebih peka menangkap informasi kualitatif deskriptif dengan secara relatif tetap berusaha mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek, artinya bahwa data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai keseluruhan yang terintegrasi (Esterberg, 2002).

Alasan Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini karena akan tergambar secara jelas dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini hanya ingin menggambarkan

keadaan, fakta, dan data nyata yang sedang terjadi pada saat sekarang. Kemudian peneliti mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi tersebut. Adapun penelitian ini difokuskan pada proses deskripsi dari perspektif pelaksanaan kebijakan penataan kelembagaan pada struktur organisasi perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dari uraian diatas, maka berdasarkan perumusan masalah penelitian serta tujuan penelitian maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

“Evaluasi penataan kelembagaan pada struktur organisasi perangkat daerah dan perubahan struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Lamandau serta faktor-faktor yang mendorong perubahannya”.

B. Sumber Informasi dan Pemilihan Informasi

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengambilan sampel sumber data dengan cara snowball sampling.

Menurut S. Nasution (Dalam Sugiyono :2007:220) menjelaskan bahwa:

Penentuan unit sampel dianggap telah memadai apabila telah sampai pada taraf “redundancy” (datanya telah jenuh ditambah sampel tidak lagi memberikan informasi baru) Teknik ini snowball sampling ini dipilih dengan pertimbangan memungkinkan peneliti untuk memperoleh sumber data yang sudah jenuh.

Yang menjadi sumber data dalam kegiatan penelitian ini adalah :

1. Orang (informan) yang dipilih secara purposive pada awalnya yang kemudian dikembangkan secara snowball yaitu : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kabag Hukum, Kabag Organisasi, Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan, Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Kepala Sub Bagian dan pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pihak-pihak yang terkait (Stakeholder) di Kabupaten Lamandau.

2. Dokumen, berbagai dokumentasi yang relevan dengan fokus penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, jumlah sampel atau informan tidak ditentukan terlebih dahulu karena dalam proses pengumpulan data bila tidak ditemukan variasi informasi, maka peneliti tidak perlu lagi melanjutkan dengan mencari informasi baru sampai hasil yang diperoleh sama dengan informasi sebelumnya. Jadi jumlah sampel bias sangat sedikit tetapi juga bias sangat banyak, hal ini tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci, kompleksitas dan keragaman fenomena sosial yang diteliti. Oleh sebab itu yang bias ditentukan hanya sample awal saja.

Dalam proses pengumpulan data jika tidak ditemukan lagi variasi informasi atau telah mencapai titik jenuh, maka peneliti tidak lagi mencari informasi baru, dan proses pengumpulan informasi dianggap selesai/ telah cukup. Dalam penelitian kualitatif, ada tiga tahap pemilihan informan yang baik jika kita memakai teknik snowball sampling dalam pengumpulan informasi yakni : *pertama*, pemilihan sample awal, yakni berupaya menemukan informan awal

untuk diwawancarai, *kedua* pemilihan informan lanjutan, guna memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi informasi yang mungkin ada, *ketiga* menghentikan pemilihan informan lanjutan, bilamana sudah tidak ditemukan lagi variasi informasi.

Kondisi lapangan untuk menemui informan peneliti tidak begitu mengalami kesulitan yang berarti, peneliti bebas melakukan wawancara, baik pagi maupun siang harinya, begitu juga tempatnya sesuai dengan situs penelitian. Umumnya peneliti melakukan wawancara di kantor ataupun di rumah informan, hal ini dilakukan agar sekaligus dapat dilakukan observasi langsung di lapangan. Dalam melakukan wawancara agar tidak terjadi kekakuan antara peneliti dengan informan dan demi terciptanya hubungan yang akrab dengan informan dan sepakat untuk memakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti kedua belah pihak, sehingga terjadi komunikasi dua arah dengan baik dan lancar.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang akan menjadi instrumen adalah peneliti sendiri, sesuai dengan teori yang diutarakan Nasution (Dalam Sugiyono 2007: 223) :

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala

sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu, dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.

Dengan demikian peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian ini akan secara langsung melakukan pengamatan (observasi), wawancara dengan narasumber serta melakukan study dokumentasi.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap, yakni :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*getting in*), diupayakan keberadaan peneliti sebagai peneliti dilokasi penelitian dan hanya diketahui pihak-pihak yang terbatas. Sebelum itu peneliti mengadakan pendekatan informal terhadap subjek penelitian untuk menjelaskan rencana dan maksud kedatangan peneliti secara etis dan simpatik. Setelah ada kesepahaman peneliti menjalin hubungan baik, etik dan simpatik dengan sumber data-informan yang dilakukan baik secara formal maupun non formal. Untuk memperoleh data yang *valid* dan *realible*, peneliti melakukan adaptasi dan proses belajar dengan sumber data sehingga bias mengurangi jarak sosial antara peneliti dengan sumber data.
2. Ketika berada dilokasi penelitian (*getting along*), pada tahap ini peneliti berusaha melakukan hubungan langsung secara pribadi yang akrab dengan subjek penelitian. Dengan menggunakan teknik snowball peneliti melakukan wawancara maupun observasi untuk mencari informasi yang lengkap dan tepat

sesuai dengan fokus penelitian dan menangkap dan mencerna makna intisari dari informasi dan fenomena yang diperoleh.

3. Mengumpulkan data (*logging the data*), dalam tahap ini peneliti menggunakan tehnik : *Pertama*, wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yang dilakukan untuk memperoleh informasi dan menangkap deskripsi tentang proses penataan kelembagaan dan pengembangan di instansi yang bersangkutan; *Kedua*, pengamatan (*observe*) yang dilakukan untuk mengungkap dan memperoleh deskripsi secara utuh dan sistematis tentang suasana yang melingkupi proses penataan kelembagaan dan pengembangan di instansi yang bersangkutan; *Ketiga*, dokumentasi (*documentation*) yang dilakukan guna mengungkap bukti-bukti nyata berbentuk dokumen, seperti peraturan perundang-undangan dan laporan hasil kegiatan di instansi yang bersangkutan.

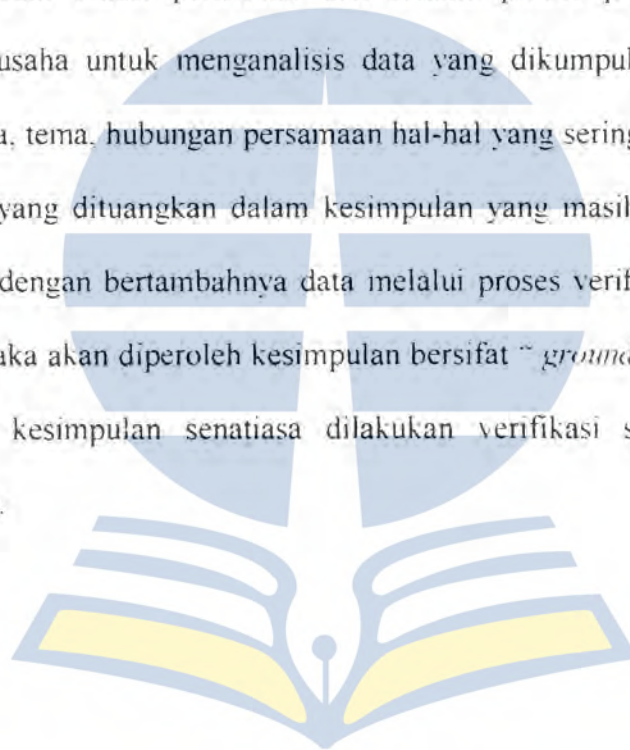
E. Metode Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1992) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa :

1. Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh dilokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses

penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus dan menulis memo.

2. Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.
3. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan cara mencari pola, tema, hubungan persamaan hal-hal yang sering muncul dan lain sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif, akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan bersifat “*grounded*”, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

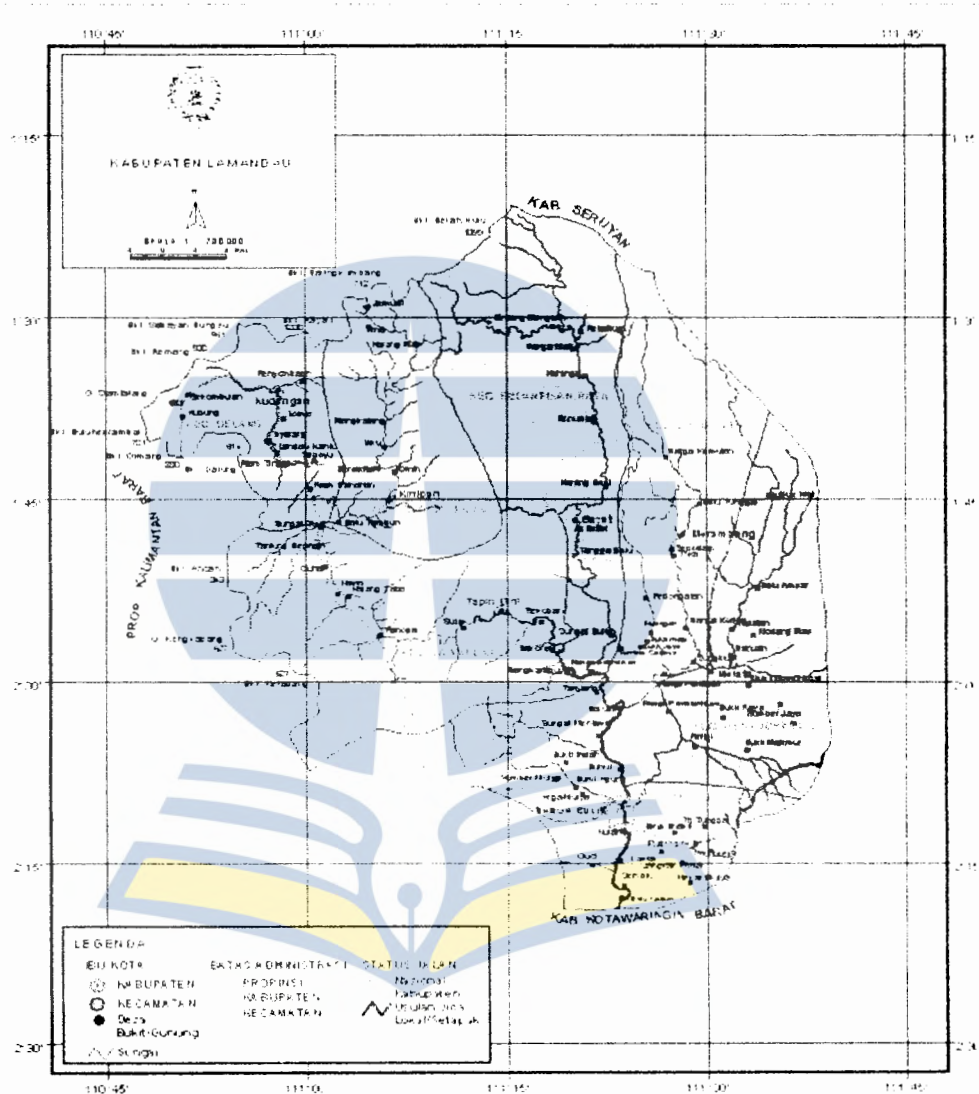
A. Deskripsi Objek Penelitian

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang disingkat dengan BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. BPBD Kabupaten Lamandau merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau serta dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Kabupaten Lamandau memiliki potensi bencana, selain disebabkan oleh aktifitas alam juga disebabkan oleh manusia (non alam) seperti konflik social, epidemic wabah penyakit, kebakaran bangunan dan lain-lain. Dari identifikasi data, diperoleh potensi bencana yang ada di Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut:

- a. Kebakaran
- b. Banjir
- c. Tanah Longsor
- d. Angin Topan /Puting Beliung
- e. Konflik Sosial
- f. Kecelakaan Transportasi
- g. Wabah

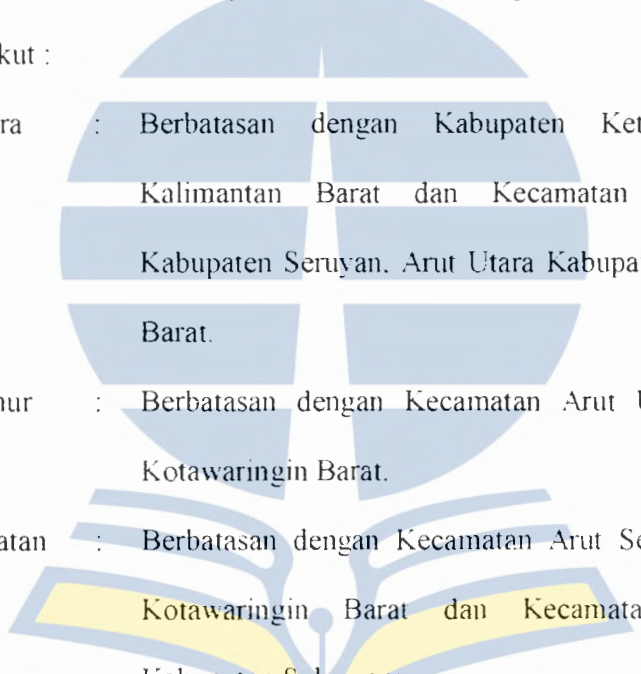
Kabupaten Lamandau secara geografis terletak pada $1^{\circ}9$ s/d $3^{\circ}36$ Lintang Selatan dan $110^{\circ}25$ s/d $112^{\circ}50$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Lamandau mencapai 6.414 Km^2 . Dengan jumlah Pendudukan Kabupaten Lamandau yaitu 17.499 orang.

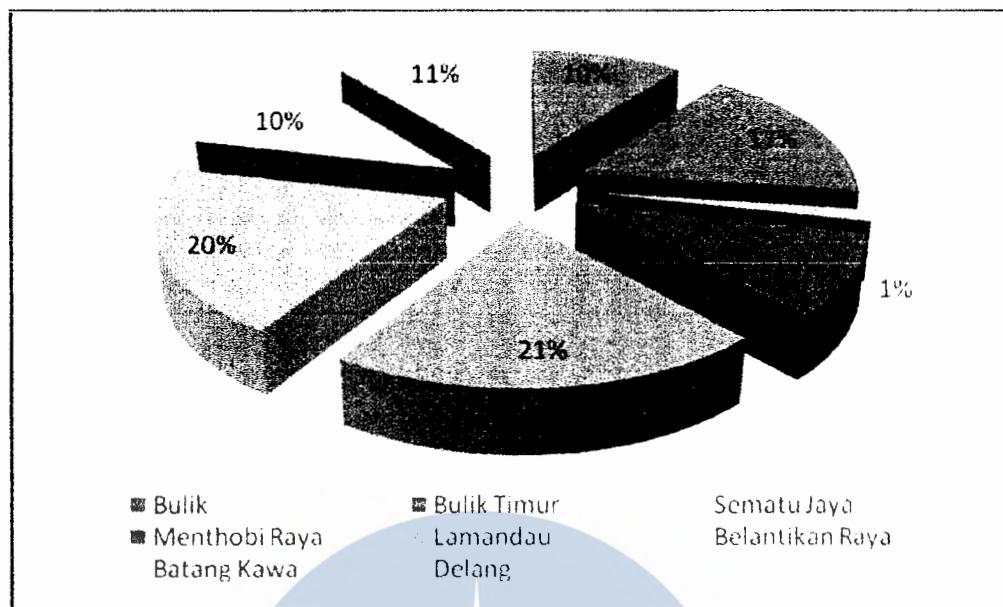


Gambar 4. 1. Peta Kabupaten Lamandau

Daerah di Kabupaten Lamandau secara umum beriklim tropis, yang dipengaruhi oleh musim kemarau/kering dan musim hujan. Musim kemarau/kering jatuh pada bulan Juni sampai dengan September pada bulan ini sering terjadi bencana kebakaran yang berdampak pada rusaknya hutan dan polusi asap yang mengganggu pernapasan. Pada musim kemarau masyarakat sering melakukan pembakaran hutan yang tujuannya untuk pembukaan lahan untuk berladang tetapi dalam pelaksanaannya sering tidak diawasi sehingga kebakaran lahan semakin meluas menyebabkan kebakaran hutan yang tidak terkontrol.

Secara administratif Kabupaten Lamandau mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- 
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan, Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kecamatan Balai Riam Kabupaten Sukamara.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.



Gambar 4. 2. Luas Wilayah (km²) Tiap Kecamatan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

Tabel 4.1.
Luas Daerah dan Persentase Luas Terhadap Kabupaten Menurut Kecamatan Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas	Persentase Luas Terhadap Kabupaten
1	2	3	4
1	Bulik	665,55	10,38
2	Bulik Timur	1.074,72	16,76
3	Sematu Jaya	86,85	1,35
4	Menthobi Raya	620,88	9,68
5	Lamandau	1.333,00	20,78
6	Belantikan Raya	1.263,00	19,69
7	Batang Kawa	685,00	10,59
8	Delang	685,00	10,59
LAMANDAU		6.414,00	100,00

Sumber / Source : Badan Pusat Statistik Kab. Lamandau

Tabel 4.2.
Nama-nama Kecamatan, Ibukota Kecamatan dan Banyaknya Desa /
Kelurahan di Kabupaten Lamandau Tahun 2012

No	Kecamatan	Nama Ibu Kota Kecamatan	Desa	Kelurahan
1	2	3	4	5
1	Bulik	Nanga Bulik	11	1
2	Bulik Timur	Merambang	12	
3	Sematu Jaya	Purworejo	7	
4	Menthobi Raya	Melata	11	
5	Lamandau	Tapi n Bini	9	1
6	Belantikan Raya	Bayat	12	
7	Batang Kawa	Kinipan	9	
8	Delang	Kudangan	9	1
Jumlah/total			80	3

Sumber / Source : Badan Pusat Statistik Kab. Lamandau

Tabel 4.3.
Banyaknya Bencana Alam di Kabupaten Lamandau Menurut
Peristiwa Tahun 2012

No	Kecamatan	Peristiwa					
		Perahu tenggelam	Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor	Angin Puyuh	Disambar Petir
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bulik	0	4	0	0	0	0
2	Bulik Timur	0	0	0	0	0	0
3	Sematu Jaya	0	1	1	0	0	0
4	Menthobi Raya	0	1	0	0	0	0
5	Lamandau	0	0	0	1	0	0
6	Belantikan Raya	0	1	0	0	1	0
7	Batang Kawa	0	1	0	0	0	0
8	Delang	0	0	1	0	0	0

No	Kecamatan	Peristiwa					
		Perahu tenggelam	Kebakaran	Banjir	Tanah Longsor	Angin Puyuh	Disambar Petir
1	2	3	4	5	6	7	8
	Jumlah/total	0	8	2	1	0	0
	Tahun 2011	1	5	0	0	0	0
	Tahun 2010	0	1	2	0	0	1
	Tahun 2009	0	4	3	0	0	0

Sumber / Source : Badan Penanggulangan Bencana Alam Kab. Lamandau

Tabel 4.4.
Banyaknya Korban Bencana Alam dan Kerugian di
Kabupaten Lamandau Menurut Peristiwa Tahun 2012

No	Kecamatan	Peristiwa			Yang dibantu	Taksiran kerugian (000 Rp)
		Meninggal	menderita	jumlah		
1	2	3	4	5	6	7
1	Bulik	0	4	4	4	286.727
2	Bulik Timur	0	0	0	0	0
3	Sematu Jaya	0	0	0	0	0
4	Menthobi Raya	0	4	4	4	93.292
5	Lamandau	0	0	0	0	0
6	Belantikan Raya	0	2	2	2	56.202
7	Batang Kawa	0	1	1	1	44.713
8	Delang	0	0	0	0	0
	Jumlah/total	0	11	11	11	480.934
	Tahun 2011	3	0	0	0	
	Tahun 2010	1	140	141	0	
	Tahun 2009	0	12	12	0	0
	Tahun 2008	0	0	0	0	0

Sumber / Source : Badan Penanggulangan Bencana Alam Kab. Lamandau

B. HASIL

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis yang merupakan jawaban epiris dari pertanyaan hasil wawancara sesuai dengan kutipan dan transkrip wawancara yang dilampirkan, didukung kajian berbagai dokumen dan konsep implementasi kebijakan. Pada bagian ini dijabarkan beberapa fokus pembahasan berdasarkan 4 (empat) faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses implementasi, yakni komunikasi, sumber daya, sikap birokrasi atau pelaksana dan struktur organisasi. Empat faktor tersebut menjadi kriteria penting dalam implementasi suatu kebijakan. Mengacu pada empat faktor tersebut :

1. **Komunikasi**

Pelaksanaan kegiatan pada BPBD mengarah kepada renstra yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2013, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Komunikasi merupakan salah satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.

Pelaksanaan kegiatan pada BPBD mengarah kepada renstra yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2013, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau dalam renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau renstra merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan pelaksanaan kebijakan BPBD Kabupaten Lamandau selama 5 (lima) tahun, yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga masyarakat.

Salah satu cara BPBD Kabupaten Lamandau mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi bencana di Kabupaten Lamandau adalah dengan dilaksanakannya pelatihan –pelatihan dan sosialisasi-sosialisasi.

Edward III dalam Leo (2012) mengemukakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu:

- 1) Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran

komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pada perencanaan dan pengendalian program (narasumber X) dengan pertanyaan : Bagaimanakah hubungan kerjasama dengan SKPD lain dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana ?

Menurut narasumber X bahwa : “BPBD Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana juga berkoordinasi dengan SKPD yang berkaitan dengan bencana yang terjadi misalkan bencana banjir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau memberikan bantuan berupa bantuan makanan kepada masyarakat”.

Kajian peneliti menunjukan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan skill oleh aparatur, dilihat dari data pegawai yang ada di Kabupaten Lamandau dapat dianalisis bahwa soal kualitas dan keterampilan juga telah dimiliki oleh sejumlah aparatur sebagai pelaksana kebijakan, akan tetapi kurangnya pelimpahan kewenangan yang nyata, kemauan serta moral dari para aparatur dalam melaksanakan kebijakan.

2) Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua.

Menurut pendapat Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Leo Agustino (2012), mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai :

“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan

tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya”.

Hal ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pada BPBD mengarah kepada renstra yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2013, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dalam renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau renstra merupakan salah satu alat komunikasi yang digunakan untuk menggambarkan arah kebijakan pelaksanaan kebijakan BPBD Kabupaten Lamandau selama 5 (lima) tahun, yang mana pelaksanaan kegiatan tersebut diawasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan juga masyarakat.

Dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dilihat dari rencana strategis BPBD Kabupaten Lamandau. Dimana program-program selama 5 (lima) tahun untuk kemajuan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Lamandau programkan. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Pelaksanaan kegiatan pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) sehingga pelaksanaan kegiatan sudah terstruktur.

3) Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Hal konsistensi terkait dengan pembahasan diatas yaitu pelaksanaan komunikasi sudah berdasarkan pada Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Lamandau.

Dalam pelaksanaan komunikasi BPBD Kabupaten Lamandau melakukan sosialisasi-sosialisasi kegiatan yang ditujukan kepada masyarakat sosialisasi tentang kebencanaan telah dilaksanakan disetiap saat apabila ada kesempatan contoh : pada saat musrenbang kecamatan, pada saat monev pasca bencana dan pada saat monev daerah rawan bencana).

Dan terdapat beberapa pelatihan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Lamandau dalam menjalankan fungsinya, yaitu :

1. Diklatsar Pemadam Kebakaran di UPT Damkar DKI Jakarta.
2. Diklat manajemen Penanggulangan Bencana.
3. Simulasi operasional peralatan Penanggulangan Bencana.

Dalam pemerintahan daerah pelaksanaan kegiatan berdasarkan penjabaran visi dan misi SKPD :

a. Visi

Perumusan visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau tidak terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok yang telah diuraikan :

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah *“Terselenggaranya Pencegahan Bencana Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Penanggulangan Bencana yang Tanggap, Cepat, Tepat, serta Mewujudkan Kabupaten Lamandau yang Aman, Nyaman dan Sehat Melalui Pemberdayaan Kemitraan dengan Masyarakat”*.

b. Misi

Berdasarkan visi tersebut, maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, misi yang diemban oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah **sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan** oleh suatu organisasi sebagai upaya pencapaian visi yang telah ditetapkan. Adanya pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran suatu organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Oleh sebab itu misi suatu organisasi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
- 2) Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 3) Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
- 4) Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- 5) Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- 6) Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

c. Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang dijabarkan dari misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kemampuan SDM (Aparatur dan masyarakat) yang menguasai teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
 - a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :
 - (1) Lancarnya administrasi perkantoran.
 - (2) Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

- (3) Meningkatnya penguasaan teknologi dan rekayasa penanggulangan bencana.
- b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :
 - (1) Peningkatan keterpaduan program dan anggaran.
 - (2) Peningkatan sarana dan prasarana.
 - (3) Optimalisasi pendidikan, pelatihan, bimtek serta sosialisasi perundang-undangan.
- c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
 - (1) Keterpaduan program dan anggaran.
 - (2) Melengkapi sarana dan prasarana.
 - (3) Peningkatan kesempatan pendidikan, pelatihan dan bimtek serta sosialisasi perundang-undangan.
- 2) Terwujudnya standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :
 - (1) Koordinasi penyusunan perencanaan pencegahan dan penanggulangan bencana, diklat dan penataan ruang.
 - (2) Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat menghadapi ancaman dan resiko bencana.
 - (3) Keterpaduan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :
 - (1) Peningkatan standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

- (2) Mewujudkan standar dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana
- (3) Penyusunan informasi daerah rawan bencana yang mudah diakses oleh masyarakat
- c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
 - (1) Standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - (2) Protap penyelenggaraan kebutuhan dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
 - (3) Pendataan daerah potensi bencana melalui peta rawan bencana.
- 3) Pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
 - a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :
 - (1) Penerapan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - (2) Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan peran lembaga usaha dalam menghadapi bencana.
 - (3) Peringatan dini, mitigasi dan gladi/simulasi.
 - b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :
 - (1) Mengimplementasikan teknologi pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
 - (2) Optimalisasi hubungan kerjasama masyarakat dan lembaga usaha dalam menghadapi bencana.

(3) Optimalisasi pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.

c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :

(1) Penetapan rencana penyelenggaraan penanggulangan bencana.

(2) Peningkatan dan pengembangan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat.

(3) Pelaksanaan sosialisasi potensi dan gladi/simulasi bencana.

4) Terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :

(1) Pengkajian, pemantauan dan penanganan tanggap darurat bencana.

(2) Pengerahan peralatan, pemberian bantuan dan logistik.

(3) Penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar.

b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :

(1) Peningkatan pelaksanaan pengkajian dan penentuan status darurat bencana.

(2) Optimalisasi penyelamatan evakuasi korban dan harta benda.

(3) Optimalisasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.

c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :

(1) Pengkajian dan penentuan status darurat bencana.

(2) Penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda.

(3) Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi.

(4) Penyelamatan dan pemulihan prasarana dan sarana.

5) Menangani pengungsi secara adil (sesuai dengan standar pelayanan minimum) serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.

a) Tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :

(1) Penilaian, pengumpulan dan pengolahan data kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(2) Pemberian bantuan darurat kemanusiaan.

(3) Perbaikan darurat bencana.

b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :

(1) Peningkatan akurasi penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(2) Pengelolaan sumber daya bantuan bencana tepat sasaran.

(3) Optimalisasi rehabilitasi dan rekonstruksi.

c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :

(1) Penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

(2) Penetapan prioritas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

(3) Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

6) Mengembangkan dan meningkatkan kemitraan dengan masyarakat, di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

a) Tujuan ini dijabarkan kedalam beberapa sasaran, yaitu antara lain :

(1) Penyaluran dana bantuan sosial rehabilitasi dan rekonstruksi.

(2) Evakuasi dan relokasi korban bencana.

(3) Perlindungan dan pemulihan akibat dampak bencana.

- (4) Penyaluran bantuan dan sumbangan bencana.
- b) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan strategi :
 - (1) Peningkatan keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat.
 - (2) Melestarikan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal.
 - (3) Optimalisasi peran serta masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- c) Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dilakukan dengan kebijakan :
 - (1) Melibatkan dan memberdayakan masyarakat.
 - (2) Mempertahankan karakter daerah dan budaya termasuk kearifan lokal.
 - (3) Menjadikan kegiatan rehab dan rekon sebagai gerakan masyarakat (korban dan pelaku aktif).

2. Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan organisasi khususnya yang tertuang dalam renstra BPBD dirasa belum mencapai harapan yang diinginkan, meskipun dalam perumusannya telah cermat, jelas dan konsisten, tetapi terdapat kendala ditingkat aparaturnya yang tidak memiliki sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Realita menunjukkan bahwa masih adanya kekurangan sumber-sumber penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau, yang menjadi penghambat suatu kebijakan ditingkat masyarakat, sumber-sumber penting meliputi aparaturnya yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsi, meskipun

adanya kerjasama tugas dan wewenang untuk menjabarkan program-program BPBD.

Menurut Edward III dalam Leo (2012), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*).

Salah satu misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau huruf 1 adalah meningkatkan kemampuan SDM (aparatur dan masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitasi dan rekontruksi (narasumber IX) dengan pertanyaan : Menurut bapak sudah idealkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber IX bahwa : “SDM pada BPBD masih kurang dikarenakan SDM yang ada masih banyak yang tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang pahami akan tupoksi masing-masing” dan “kurangnya jumlah SDM yang terampil dan mengerti benar akan tugasnya. Sarpras yang masih belum lengkap dan mendukung, jabatan-jabatan yang masih kosong”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plh. Sekretaris BPBD (narasumber II) dengan pertanyaan : Menurut bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber II yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau yaitu “masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan

prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik serta SDM yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinya”

Dalam wawancara dengan narasumber IX dan narasumber II diperoleh informasi bahwa SDM pada BPBD masih kurang dikarenakan SDM yang ada masih banyak yang tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang pemahannya akan tupoksi masing-masing dan kurang pemahaman atau masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi. Hal ini membuktikan tentang pentingnya BPBD dibentuk. Tetapi kurangnya pemahaman yang ada di tingkat atas tentang pentingnya BPBD dan tentang besarnya resiko bencana dan cara meminimalisir bencana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Syaiful Anwar Djamil (2002) berpendapat bahwa “Terdapat Pengaruh positif antara variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dengan variabel Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Hal ini terbukti bahwa variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah tepat mempengaruhi peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah. Dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan oleh variabel Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah terhadap variabel terikatnya Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebesar 71,5%.”

Dari penelitian terdahulu oleh Syaiful Anwar Djamil (2002) dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Study di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim), disebutkan bahwa dengan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah tepat mempengaruhi peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga dengan masih banyaknya jabatan yang kosong pada BPBD

mengakibatkan kurang efektivitas pelaksanaan otonomi daerah khususnya pelaksanaan kegiatan/pelayanan pada BPBD.

- 2) Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

Pertama, setiap PNS pada BPBD Kabupaten Lamandau bekerja berdasarkan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. *Kedua*, data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan BPBD Kabupaten Lamandau masih belum sesuai hal ini dapat dilihat pada laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Semester I Tahun 2014, masih banyak program pemerintah pusat masih belum diterapkan pada BPBD Kabupaten Lamandau. Sehingga capaian SPM bidang pemerintahan dalam negeri masih rendah.

- 3) Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang

diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- 4) Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana pada Perencanaan dan Pengendalian Program (narasumber I) dengan Pertanyaan : Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber I yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau yaitu “Kurangnya SDM, kurang kompak elemen lembaga terkait dan peralatan yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (narasumber IX) dengan Pertanyaan : Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?

Menurut Narasumber IX bahwa : “Yang belum tercover pada BPBD Kabupaten Lamandau kegiatannya : Pembangunan workshop, Pelaksanaan Pelatihan DALA (Damage & losses assessment), pelatihan TRC, Pengadaan Damkar Mini, pembangunan Gudang Logistik dan Pelatihan/Demo Penanganan Bencana Banjir dan Kebakaran”.

Menanggapi banyaknya kebutuhan akan sarana dan prasarana penunjang kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau diharapkan perhatian dari Eksekutif dan Legislatif Kabupaten Lamandau dalam penganggaran pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Lamandau. Hal ini tidak sejalan dengan

salah satu tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Lamandau yaitu Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur.

a. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Lamandau didukung oleh 33 (tiga puluh tiga) orang Pegawai, terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil atau 64,63% dan 12 (dua belas) orang Tenaga Harian Lepas atau 35,37%. Kondisi kepegawaian BPBD Kabupaten Lamandau sampai dengan April 2014 selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Kondisi dan Kualifikasi Pegawai

No	Uraian	Tahun (Jumlah)			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
1.	Kualifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan :				
	○ SMP	-	-	-	-
	○ SMU	6	13	12	12
	○ D3	3	3	3	3
	○ S1	4	6	6	6
	○ S2	-	-	-	-
2.	Masa Kerja :				
	○ 0 – 5 Tahun	2	2	2	2
	○ 5 – 10 Tahun	6	14	15	15
	○ 10 – 15 Tahun	1	1	1	1
	○ 15 – 20 Tahun	-	-	-	-
	○ > 20 Tahun	4	5	4	4
3.	Usia :				
	○ 18 – 30 Tahun	4	6	3	3
	○ 30 – 40 Tahun	4	10	14	14
	○ 40 – 50 Tahun	1	2	2	2
	○ > 50 Tahun	4	4	3	3
4.	Jenis Kelamin :				

No	Uraian	Tahun (Jumlah)			
		2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6
	○ Laki-laki	9	17	18	18
	○ Perempuan	4	5	4	4
5	Golongan :				
	○ IV	2	2	2	2
	○ III	5	6	6	6
	○ II	6	13	14	14
6.	Eseloning:				
	○ I	-	-	-	-
	○ II	1	1	1	1
	○ III	2	4	3	3
	○ IV	2	2	2	2
	○ Non Eselon (Pelaksana)	8	15	6	6
7.	Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	-	-	-	-
	○ Diklatpim II	2	3	3	3
	○ Diklatpim III	-	1	1	1
	○ Diklatpim IV	1	1	-	-
	○ ADUM				

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada **Tabel 4.6.**

Tabel 4.6.
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas
Berdasarkan Golongan Ruang
(Per April 2014)

No	Status Kepegawaian	Gol/ Ruang	Unit Kerja di Lingkungan BPBD Kabupaten Lamandau						Total
			Kep ala Bada n	Kepala Pelaks ana Badan	Sekre taris	Bidang Pencegaha n dan Kesiapsiag aan	Bidang Kedarur atan dan Logistik	Bidang Rehabilit asi dan Rekonstr uksi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	PNS								
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	-	1	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tk.I	IV/b	-	-	-	-	-	-	0
3.	Pembina	IV/a	-	-	-	-	1	-	1
4.	Penata Tk.I	III/d	-	-	-	1	-	1	2
5.	Penata	III/c	-	-	-	-	-	-	0
6.	Penata Muda Tk.I	III/b	-	-	1	-	1	1	3
7.	Penata Muda	III/a	-	-	-	1	-	-	1
8.	Pengatur Tk.I	II/d	-	-	-	-	-	1	1
9.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	-	-	4	5	1	-	10
10.	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	1	-	-	1
11.	Juru Tk.I	I/d	-	-	-	-	-	-	0
12.	Juru	I/c	-	-	-	-	-	-	0
13.	Juru Muda Tk. I	I/b	-	-	-	-	-	-	0
14.	Juru Muda	I/a	-	-	-	-	-	-	0
B	THL	-	-	-	7	5	-	-	12
	TOTAL	-	0	1	12	14	3	3	33

b. Sumber Daya Infrastruktur

BPBD Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan tugasnya di dukung sarana dan prasarana yang disajikan dalam **Tabel 4.7.** berikut:

Tabel 4.7.
Daftar Sarana dan Prasarana Perkantoran
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau

Nomor	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
1	Peralatan Komputer Mainframe lain-lain (PC)	4 unit
2	Personal Komputer (Laptop)	5 unit
3	Printer	7 unit
4	Instalasi (Pengadaan Instalasi Telepon/Fax)	1 set
5	Penyambungan Telepon	1 buah
6	Penyambungan Speedy	1 buah
7	Kabel Drop Were	1 buah
8	POE	1 buah
9	Kabel UPT	1 buah
10	Instalasi Telepon/Fax	1 buah
11	Wireless	1 buah
12	Gorden	1 paket
13	Modem	1 buah
14	Bangunan Gedung Kantor	1 unit
15	Bangunan Tempat Kerja lain-lain	1 unit
16	Water Treatment (portable/1 set)	1 unit
17	Truck (mobil dapur)	1 unit
18	Pick Up (mobil diesel double cabin)	1 unit
19	Pick Up (mobil rescue HT)	1 unit
20	Sepeda Motor	2 unit
21	Alat Angkut Penumpang	1 unit
22	Perahu Penumpang	1 unit

Nomor	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	2	3
23	Alat Ukur Lainnya	1 unit
24	Mesin Tik Manual Standar (14-16)	1 unit
25	Lemari Besi	3 unit
26	Filling Besi/Baja (filling kabinet 4 laci)	9 buah
27	Peti Uang (brangkas)	1 buah
28	Lemari Kayu (lemari buku)	6 buah
29	Kasur (velbed 10 set)	1 unit
30	Tenda Kerucut	1 unit
31	Tenda (tenda posko)	2 unit
32	Tenda (tenda pleton)	3 unit
33	Tenda (tenda regu)	4 unit
34	Tenda (tenda keluarga)	5 unit
35	Sofa	1 set
36	Dispenser	3 buah
37	Handy Cam	1 buah
38	Senter Lampu (lampu senter HID)	1 buah
39	Disk Pack (4 dan 8 gb)	6 buah
40	Hardisk	2 buah
41	Meja Kerja Eselon II, III dan IV	7 buah
42	Meja kerja Staf	20 buah
43	Kursi Kerja Eselon II, III dan IV	7 buah
44	Kursi Kerja Staf	20 buah
45	Camera Digital	1 buah
46	Faximili	1 buah
47	Unit Transeiver SSB Portable (SSB 1 unit)	1 unit
48	Alat Komunikasi Radio SSB (HT)	1 unit
49	Unit Transiever VHF Portable (RIG)	1 unit
50	Generator Set (genset 5 KVA/2 unit)	1 unit

c. Disposisi /Sikap Birokrasi

Pemerintah daerah dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mempercepat laju pembangunan daerah bagi kesejahteraan masyarakat, masih diperhadapkan dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan berupa perkantoran dan fasilitas lainnya, sehingga pembiayaan diperhadapkan pada sejumlah kebutuhan jika kemampuan pengelolaan potensi dilakukan dengan baik hal ini dapat diatasi.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo (2012) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

Seperti dijelaskan diatas pada faktor komunikasi yang mana masih terdapat 10 (sepuluh) jabatan yang masih kosong sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Badan Pelaksana BPBD Kabupaten Lamandau (narasumber I) dengan Pertanyaan: Menurut Bapak sudah cukupkah Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?

Menurut Narasumber I bahwa :“ Sangat kurang dan untuk sekarang ini kami sama-sama / bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada”.

Salah satu cara BPBD dalam menyikapi kekurangan ini adalah dengan menambah jumlah Tenaga Harian Lepas (THL) yang dapat kita lihat pada tabel

4.6. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Golongan Ruang, dimana untuk PNS terdapat 21 (dua puluh satu) orang dan ditambah 12 (dua belas) tenaga harian lepas.

2) Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Pemberian insentif pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan peraturan bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Dilingkup Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2014

Dalam pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah terdapat honor tim kegiatan sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sudah ada anggaran untuk masing-masing PNS. pembayaran honor sesuai dengan jabatan didalam tim yang mana penganggaran honor tersebut disesuaikan dengan Standar Biaya Umum.

Bentuk lain yang perlu dikembangkan pada BPBD Kabupaten Lamandau adalah pengambilan keputusan yang efektif bergantung pada kreasi dari bidang-bidang sebagai pelaksanaan operasional. Disisi lain ditingkatkannya kualitas hubungan interpersonal (antar pribadi) dengan SKPD tertentu, yang

menumbuhkan kepercayaan dan dukungan yang saling menunjang yang didukung oleh keterampilan-keterampilan (*Skills*) aparaturnya daerah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaksana pada Perencanaan dan Pengendalian Program (narasumber X) dengan Pertanyaan : Bagaimanakah hubungan kerjasama dengan SKPD lain dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana?

Menurut Narasumber X bahwa : “BPBD Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana juga berkoordinasi dengan SKPD yang berkaitan dengan bencana yang terjadi misalkan Bencana banjir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau memberikan bantuan berupa bantuan makanan kepada masyarakat”.

Kajian peneliti menunjukkan bahwa keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan skill oleh aparaturnya, dilihat dari data pegawai yang ada di Kabupaten Lamandau dapat dianalisis bahwa soal kualitas dan keterampilan juga telah dimiliki oleh sejumlah aparaturnya sebagai pelaksana kebijakan, akan tetapi kurangnya pelimpahan kewenangan yang nyata, kemauan serta moral dari para aparaturnya dalam melaksanakan kebijakan.

Dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah dilihat dari Rencana Strategis BPBD Kabupaten Lamandau. Dimana program-program selama 5 (lima) tahun untuk kemajuan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Lamandau programkan. Untuk melihat pencapaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2011-2013 dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaksana pada perencanaan dan pengendalian program (narasumber I) dengan pertanyaan : Menurut Bapak apa

yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber I yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau yaitu “ Kurangnya SDM, kurang kompak elemen lembaga terkait dan peralatan yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan yang ada”.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber I diperoleh beberapa kendala yang mana kendala-kendala tersebut merupakan hal-hal yang bersifat fatal, dalam hal ini dibutuhkan sikap dari pengambil keputusan/kepala daerah untuk menyikapi hal ini dimana perlu ditambahkannya sumber daya manusia pada BPBD Kabupaten Lamandau, untuk ketidak kompakkan lembaga terkait perlu disusunnya Keputusan Bupati tentang tanggap siaga bencana yang terdiri dari SKPD yang berhubungan dengan tindak lanjut penanggulangan bencana yang mana keputusan tersebut bersifat mengikat dimana BPBD Kabupaten Lamandau sebagai koordinator dan selalu berkoordinasi dengan kepala daerah dalam pengambilan keputusan, perlu dilakukan inventarisasi kelengkapan BPBD sehingga diperoleh kekurangan yang dibutuhkan dan dapat diajukan sebagai program pengadaan tahun depan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plh. Sekretaris BPBD (narasumber II) dengan Pertanyaan : Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber II yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau yaitu “masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik serta SDM yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinya”

Dalam wawancara dengan narasumber II diperoleh informasi bahwa kurang pemahaman atau masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi. Hal ini membuktikan tentang pentingnya BPBD dibentuk. Tetapi kurangnya pemahaman yang ada di tingkat atas tentang pentingnya BPBD dan tentang besarnya resiko bencana dan cara meminimalisir bencana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Plh. Sekretaris BPBD (narasumber II) dengan Pertanyaan : Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di tiap bagian ?

Hal ini dapat dilihat dengan hasil wawancara dengan narasumber II yaitu : "Perlu dikoreksi : BPBD tidak hanya menangani bencana yang diakibatkan oleh alam tetapi juga non alam seperti : kerusakan, kebakaran akibat kelalaian manusia, wabah penyakit, perang antar suku/etnis.

Luasnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Kabupaten Lamandau merupakan salah satu hal yang menyebabkan memang diperlukannya BPBD di Kabupaten Lamandau.

Pelaksanaan kapasitas pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau dapat di katagorikan pada 6 (Enam) peran utama yang saling terkait, yaitu :

- 1) Sebagai Koordinator Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;
- 2) Sebagai Pusat Komando Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah;
- 3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;
- 4) Pelaksana Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;

- 5) Koordinator Perencanaan dan pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan daerah pasca bencana di semua bidang;
- 6) Penghimpunan data, informasi dan dokumentasi berkaitan pelaporan kejadian bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Keenam kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis :

- 1) Sebagai Koordinator Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;

BPBD Kabupaten Lamandau dalam usaha pelaksanaan penanggulangan bencana tidak bisa lepas dari peran aktif Dinas/Badan/Instansi terkait, peran serta masyarakat dan swasta yang ada di Kabupaten Lamandau. Oleh sebab itu dalam usaha penanggulangan bencana BPBD Kabupaten Lamandau senantiasa melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Badan/Instansi lainnya yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana seperti Koordinasi Titik Api di daerah Kabupaten Lamandau dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lamandau.

- 2) Sebagai Pusat Komando Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Daerah;

BPBD Kabupaten Lamandau dalam pelaksanaan penanggulangan bencana melaksanakan peran sebagai pusat komando untuk mengarahkan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Dinas/Badan/Instansi terkait serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dalam pelaksanaan penanggulangan bencana daerah.

3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;

BPBD Kabupaten Lamandau sebagai pusat penelitian dan pengembangan usaha penanggulangan bencana melaksanakan kajian dan evaluasi data yang telah dikumpulkan sebagai pedoman penyusunan usaha penanggulangan bencana, penyusunan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan peta rawan bencana dan penyusunan prosedur tetap penanggulangan bencana.

4) Pelaksana Usaha Penanggulangan Bencana Daerah;

Dalam Pelaksana Usaha Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Lamandau telah melaksanakan berbagai program secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Dinas/Badan/Instansi lain di Kabupaten Lamandau guna mengurangi terjadinya bencana di Kabupaten Lamandau antara lain memberikan himbauan melalui Papan Informasi Kebencanaan dan Sosialisasi Pencegahan Dini Bencana.

5) Koordinator Perencanaan dan pengawasan rehabilitasi dan rekonstruksi pembangunan daerah pasca bencana di semua bidang;

BPBD Kabupaten Lamandau dalam perannya pada masa pasca bencana melaksanakan pengumpulan data, informasi dan permasalahan untuk menyusun program guna pemecahan masalah, serta melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program untuk memulihkan dan membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana dan sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun masyarakat. Dan sasaran utamanya adalah tumbuh kembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala

aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana sampai ketinggian yang memadai.

- 6) Penghimpunan data, informasi dan dokumentasi berkaitan pelaporan kejadian bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, BPBD Kabupaten Lamandau telah melakukan penghimpunan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan laporan kejadian bencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana kepada Bupati Lamandau, BPBD Provinsi dan Badan Penanggulangan Bencana Nasional sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.

Untuk mengukur capaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan tugas dan fungsi yang telah dikategorikan pada 6 (enam) tugas dan fungsi utama diatas, berdasarkan indikator sasaran/target serta anggaran dan realisasi BPBD Kabupaten Lamandau periode 2011-2013 disajikan dalam **Tabel 4.8. s.d. Tabel 4.10.**

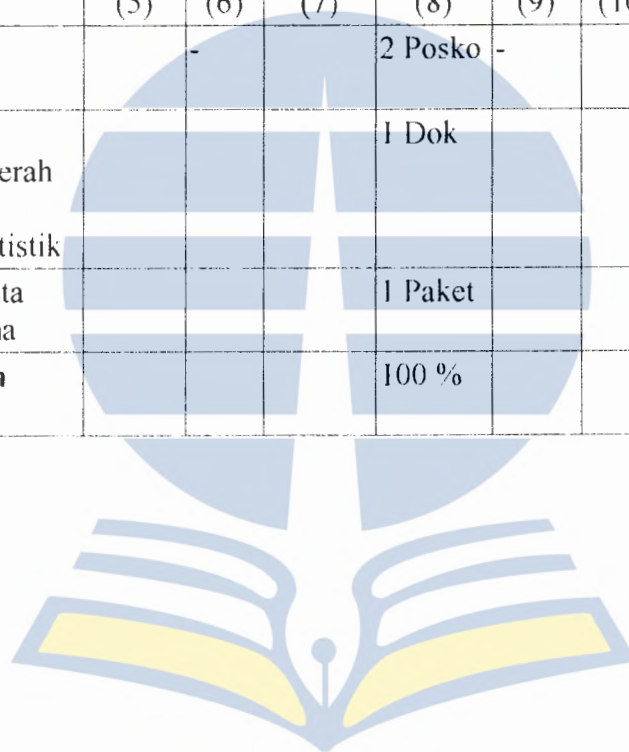
Tabel 4.8.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2011-2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			Catatan Analisis
					2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Evaluasi Kinerja Pelayanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencanadi wilayah Kabupaten Lamandau		Rehabilitasi dan Rekonstruksi											Monev dilaksanakan sesuai laporan masyarakat yang resmi dilaporkan ke BPBD
			Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pasca Bencana		-	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	-	100%	100%	
			Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi		-	1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	-	100%	100%	
			Persentasi penanganan korban Pasca Bencana		-	100%	100%	-	100%	100%	-	100%	100%	
2	Terlaksananya Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana		Rehabilitasi dan Rekonstruksi											Penanganan dilakukan menindaklanjuti laporan tertulis dari korban dan berdasarkan data kerugian dan kerusakan yang dialami korban
			Terselenggaranya Penanganan Korban Pasca Bencana		-	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	-	100%	100%	
			Jumlah Data Penanganan Pasca Bencana		-	1 Dok	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	-	100%	100%	
			Persentasi Penanganan Korban Pasca Bencana		100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel 4.9.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Tahun Anggaran 2011-2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			Catatan Analisis
					2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Evaluasi Kinerja Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Prabencana di Wilayah Lamandau		Pencegahan dan Kesiapsiagaan											Monev dilaksanakan sesuai laporan masyarakat yang resmi dilaporkan ke BPBD
			Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	-		1 Tahun	-			1 Tahun	-		100%	
			Jumlah Peserta	-		50 Peserta	-	-		50 Peserta	-		100%	
			Terselenggaranya Operasional Patroli Satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran Hutan	-		100%	-			100%	-		100%	
			Jumlah Wilayah Kerja			8 Kec.				8 Kec			100%	
			Terselenggaranya Pembangunan Posko Penanggulangan Bencana	-		1 Tahun	-			1 Tahun	-		100%	

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			Catatan Analisis
					2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			Jumlah Posko		-		2 Posko	-		2 Posko	-		100%	
			Terselenggaranya Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana Dan Penyusunan Buku Statistik				1 Dok			1 DOK			100%	
			Aplikasi Profil dan Peta Daerah Rawan Bencana				1 Paket			1 Paket			100 %	
			Penrsentasi Kegiatan Prabencana				100 %			100 %			100 %	



Tabel 4.10.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Bidang Kedaruratan dan logistik Tahun Anggaran 2011-2013

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-			Realisasi Capaian Tahun ke-			Rasio Capaian pada Tahun ke-			Catatan Analisis
					2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kegiatan Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten Lamandau		Kedaruratan dan logistic											Monev dilaksanakan berdasarkan informasi dari masyarakat dan pihak terkait kepada BPBD
			Terselenggaranya Monitoring , Evaluasi dan Pelopor Kejadian Bencana	-	1 Tahun	1 Tahun	-	1 Tahun	1 Tahun	-	100%	100%		
			Jumlah Dokumen Laporan Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan Kejadian Bencana	-	1 Buku	1Buku	-	-	1Buku	-	100 %	100%		
			Presentasi Penanganan Monitoring ,Evaluasi dan Pelapor Kejadian Bencana	-	100%	100%	-	100 %	100%	-	100 %	100%		

Untuk tabel inteprestasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Lamandau, disajikan pada

Tabel 4.11



Tabel 4.11
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Tahun Anggaran 2011-2013

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	A. Belanja Tidak Langsung	166.000.000	837.358.315	1.223.200.000	133.539.827	800.193.313	783.809.622	-	-	-	-	-
	B. Belanja Langsung	100.000.000	3.232.459.290	2.530.642.080	99.624.525	3.087.238.220	1.320.729.967	-	-	-	-	-
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100.000.000	878.409.290	1.108.696.280	-	819.837.120	570.781.967	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	180.000	63.200.000	45.700.000	-	59.100.000	3.150.000	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	3.000.000	38.400.000	-	943.107	5.967.492	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	6.180.000	12.320.000	-	6.153.000	3.890.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	20.000.000	-	-	5.235.100	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12.600.000	134.735.000	354.223.000	-	127.241.000	166.808.100	-	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	29.908.800	28.944.000	-	14.713.200	13.105.200	-	-	-	-	-
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.596.250	59.440.000	92.048.300	-	59.423.625	70.138.575	-	-	-	-	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	800.000	19.724.500	22.300.000	-	19.710.200	12.412.500	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	6.225.000	14.275.000	-	6.210.000	6.810.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-	20.000.000	-	-	19.200.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	7.095.990	10.277.000	-	7.090.525	4.465.400	-	-	-	-	-
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	-	15.120.000	20.400.000	-	6.960.000	7.680.000	-	-	-	-	-
	Penyediaan Makanan dan Minuman	-	42.780.000	46.875.000	-	23.281.000	18.576.000	-	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	18.000.000	224.995.000	270.000.000	-	223.468.463	137.848.600	-	-	-	-	-
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah	26.823.750	266.005.000	112.933.980	-	265.543.000	95.495.000	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		-	2.216.250.000	923.945.800	-	2.143.676.100	569.260.000	-	-	-	-	-
	Pembangunan Gedung Kantor	-	1.574.000.000	-	-	1.536.971.000	-	-	-	-	-	-
	Pembangunan Rumah Dinas	-	-	75.000.000	-	-	74.750.000	-	-	-	-	-
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	400.000.000	68.000.000	-	369.000.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Perlengkapan Kantor	-	93.000.000	8.000.000	-	91.790.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan Kantor	-	103.750.000	211.945.800	-	103.400.000	93.280.000	-	-	-	-	-
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	45.500.000	211.000.000	-	42.515.100	52.930.000	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Penataan Lingkungan Kantor	-	-	350.000.000	-	-	348.300.000	-	-	-	-	-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		-	18.300.000	9.300.000	-	17.360.000	8.349.000	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	-	10.650.000	-	-	9.710.000	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu	-	7.650.000	9.300.000	-	7.650.000	8.349.000	-	-	-	-	-
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		-	31.400.000	95.000.000	-	20.000.000	22.952.000	-	-	-	-	-
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	20.000.000	40.000.000	-	20.000.000	8.220.000	-	-	-	-	-
	Bimbingan Teknis Bencana Alam	-	11.400.000	55.000.000	-	-	14.732.000	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Pameran Tingkat Kabupaten	-	20.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	-	-	-	-	-
6. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		-	58.100.000	167.000.000	-	58.100.000	86.791.000	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Kedaruratan	-	58.100.000	-	-	58.100.000	-	-	-	-	-	-
	Operasional Patroli satgas dan Posko Penanggulangan Kebakaran hutan, lahan dan Perkarangan	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, lahan	-	-	25.000.000	-	-	24.991.000	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	dan Perkarangan											
	Pembangunan Posko Penanggulangan Bencana	-	-	62.000.000	-	-	61.800.000	-	-	-	-	-
	7. Program Pasca Bencana	-	-	50.000.000	-	-	9.850.000	-	-	-	-	-
	Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	-	-	50.000.000	-	-	9.850.000	-	-	-	-	-
	8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	-	10.000.000	28.400.000	-	8.265.000	28.400.000	-	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	-	10.000.000	28.400.000	-	8.265.000	28.400.000	-	-	-	-	-

Uraian		Anggaran pada Tahun ke-			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
Program	Kegiatan	2011	2012	2013	2011	2012	2013	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9. Program Tanggap Darurat		-	-	60.000.000	-	-	24.346.000	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kejadian Bencana	-	-	60.000.000	-	-	24.346.000	-	-	-	-	-
10. Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		-	-	68.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan Profil Daerah Rawan Bencana dan Penyusunan Buku Statistik Bencana	-	-	68.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Total BTL + BL		266.000.000	4.069.817.605	3.753.842.080	233.164.352	3.887.431.533	2.104.539.589	-	-	-	-	-

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi daerah sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam bab ini bahwa struktur birokrasi dalam era otonomi ini merupakan alat dalam mencapai keefektifan kebijakan kaitannya dengan persoalan publik, artinya bahwa Struktur organisasi yang ideal sesuai dengan potensi daerah akan lebih cepat mencapai kemajuan pembangunan daerah. Struktur birokrasi merupakan institusi yang domain dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun ruang lingkup tugasnya berbeda-beda, dimana organisasi SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepada daerah (Bupati) dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah, tetapi struktur birokrasi yang terlalu luas akan berpengaruh terhadap sumber daya manusia (Aparatur) maupun sumber anggaran.

Porte dan Denhart dalam Liliweri (1997) mengemukakan bahwa :

“Derajat kelenturan atau fleksibilitas organisasi dapat digambarkan dengan proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan-perubahan dalam organisasi”.

Salah satu kesukaran dalam menentukan tingkat kelenturan organisasi adalah sejauh mana koordinasi diantara satuan kerja dalam organisasi sehingga dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar. Oleh karena itu akibat adanya kelenturan itu sendiri maka setiap organisasi harus memiliki suatu “strong point” agar dia dapat bertahan terhadap perubahan yang melandanya, dapat dilihat pada faktor organisasi terdapat beberapa kendala dalam evaluasi struktur birokrasi, dapat dilihat pada beberapa hasil wawancara berikut Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (narasumber II) dengan pertanyaan : Menurut bapak apakah

kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan riil penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau ?

Sebagaimana hasil wawancara dengan narasumber IV bahwa : “Sudah sesuai, karena BPBD merupakan sebuah kerja yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kebencanaan BPBD di Kabupaten Lamandau sangat besar dalam rangka kesiapsiagaan bencana mengingat Kabupaten Lamandau merupakan daerah rawan bencana banjir, kebakaran dan longsor karena daerah yang geografisnya terdiri dari perbukitan, hutan dan sungai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (narasumber III) dengan pertanyaan : Menurut Bapak apakah kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan riil Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?

Sedangkan hasil wawancara dengan narasumber III, bahwa : “Sudah sesuai, karena pembentukan BPBD Kabupaten Lamandau telah didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah”.

Dari pernyataan 2 (dua) orang narasumber diatas menjelaskan tentang kelembagaan pada BPBD Kabupaten Lamandau, pada wawancara tersebut digambarkan bahwa penyusunan organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku penyusunan Kelembagaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah tetapi dalam penyusunan organisasi dan tata kerja BPBD menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah karena untuk struktur BPBD berbeda dengan SKPD yang lainnya yaitu BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah, serta dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD (narasumber I) dengan pertanyaan : Menurut bapak apakah kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan BPBD Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber I terkait tentang kelembagaan pada BPBD, bahwa : “Masih kurang ideal dikarenakan kedudukan Pemadam Kebakaran di BPBD sehingga pada Perda tidak ada yang tertulis bahwa Damkar di bawah salah satu bidang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (narasumber VIII) dengan pertanyaan : Menurut bapak pemadam kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?

Menurut narasumber VIII terkait tentang kelembagaan pada BPBD, bahwa : “Belum. Damkar BPBD sebaiknya dibuat UPT atau bidang tersendiri, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien”.

Berdasarkan hasil wawancara pada 2 (dua) orang narasumber pada BPBD Kabupaten Lamandau dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau dirasa perlu dilakukan perubahan terkait dengan fungsi dari pemadam kebakaran dimana pemadam kebakaran ini dalam tugas pokok dan fungsinya melekat pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, arahan dari BPBD Kabupaten Lamandau adalah agar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau dapat merevisi peraturan daerah Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan menambahkan struktur Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber I dan narasumber VIII narasumber V memberikan tanggapan atas pernyataan dari narasumber I dan narasumber VIII.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan (narasumber V) dengan pertanyaan : Menurut bapak apakah kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan riil penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau ?

Menurut narasumber V terkait tentang kelembagaan pada BPBD, bahwa : “Menurut pendapat saya kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait tentang keberadaan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang mana BPBD Kabupaten Lamandau menginginkan dilaksanakan perubahan SOTK pada BPBD Kabupaten Lamandau dengan memasukan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT). Menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan rapat tentang kelembagaan diprovinsi Kalimantan Tengah di peroleh kesimpulan: Untuk penyusunan Organisasi Perangkat Daerah harus sesuai dengan peraturan yang menaungi penyusunan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdapat fungsi dari UPT sehingga dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat dirubah. Untuk Fungsi Pemadam Kebakaran pada tahun 2011 telah dikosultasikan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kedudukan Pemadam Kebakaran di Bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan dimasukan pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok & Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau”.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber V diperoleh penjelasan tentang kelembagaan pada BPBD Kabupaten Lamandau. Bahwa penyusunan Organisasi Perangkat Daerah harus sesuai dengan peraturan yang menaungi penyusunan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdapat fungsi dari UPT sehingga dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat dirubah.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok & Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau sudah jelas tentang fungsi Pemadam Kebakaran di bawah Bidang Pencegahan, dan Kesiapsiagaan.

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 pada pasal 4 disebutkan bahwa BPBD Kabupaten Lamandau mempunyai:

a. Tugas Pokok

- 1) Menetapkan Pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana dan kegiatan penanggulangannya.
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap tentang penanggulangan bencana.
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- 6) Melaporkan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
- 7) Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

- 8) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- 9) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan daerah.

b. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari :

- a) Kepala Badan;
- b) Unsur pengarah, terdiri atas:
 - (1) Organisasi Perangkat Daerah Terkait;
 - (2) Intansi Vertikal Terkait;
 - (3) Profesional/ Ahli.
- c) Kepala pelaksana, membawahkan :
 - (1) Sekretariat, terdiri atas :
 - (a) Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - (b) Sub Bagian Keuangan;
 - (c) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan.

(2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

- (a) Seksi Pencegahan;
- (b) Seksi Kesiapsiagaan.

(3) Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas :

- (a) Seksi Kedaruratan;
- (b) Seksi Logistik.

(4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas :

- (a) Seksi Rehabilitasi;
- (b) Seksi Rekonstruksi.

d) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kepala BPBD

Kepala BPBD secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah dibantu oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana.

d. Unsur Pengarah

Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara rinci uraian tugas Pengarah Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi bencana daerah.
- 2) Menganalisa dan mengembangkan informasi peristiwa bencana daerah.
- 3) Menganalisa dan mengembangkan informasi potensi penanggulangan bencana daerah.

- 4) Menghimpun dan menginventarisasi kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- 5) Merumuskan dan menyusun konsep pengembangan dan pemanfaatan teknologi penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- 6) Merumuskan dan menyusun konsep pengaturan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bencana daerah.
- 7) Merumuskan dan menyusun konsep kerjasama penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- 8) Memantau dan mengevaluasi efentifitas kegiatan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- 9) Memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan penanganan dan penanggulangan bencana daerah.
- 10) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

e. Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana

Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Secara rinci uraian tugas kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan koordinasi dan komando penyelenggaraan penanganan dan penanggulangan bencana.
- 2) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pencegahan bencana.

- 3) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengenalan dan pengkajian potensi ancaman bencana.
- 4) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dan pengurangan resiko bencana.
- 5) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 6) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
- 7) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan peringatan dini dalam penanggulangan bencana.
- 8) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program pengembangan mitigasi dan penanggulangan bencana.
- 9) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program penanganan tanggap darurat.
- 10) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program analisis dampak kerusakan bencana.
- 11) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rehabilitasi dampak kerusakan bencana.
- 12) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan program rekonstruksi dampak kerusakan bencana.
- 13) Mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan.
- 14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Unsur-unsur organisasi pelaksana penanggulangan bencana terdiri dari :

f. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat keprotokolan serta administrasi kepegawaian. Secara rinci uraian tugas sekretariat adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data bencana.
- b) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan serta pelaporan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- c) Menyusun program, membina, mengatur, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan rencana anggaran.
- d) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- e) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- f) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- g) Menyusun program, membina, mengatur dan mengevaluasi pengelolaan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
- h) Menyusun program, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud sekretariat BPBD ini dilengkapi dengan 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

1). Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program

Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dan penyajian data, penyusunan program dan rencana kegiatan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Yang mana Uraian Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program meliputi :

- a) Menyiapkan rencana hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f) Mengadakan koordinasi dengan kepala Sub Bagian dan Bidang untuk keharmonisan kerja;

- g) Melakukan pengumpulan, analisis dan penyajian data dibidang penanggulangan bencana;
- h) Menyiapkan bahan perumusan rencana dan program kerja berdasarkan rencana kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
- i) Menyiapkan bahan laporan badan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j) Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam peningkatan kinerja badan;
- k) Membuat hasil laporan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan;
- l) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- m) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

2). Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyusun rencana anggaran dan mengelola keuangan serta menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Yang mana Uraian Tugas Sub Bagian Keuangan meliputi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian Keuangan sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Sekretariat;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f) Menyusun rencana anggaran biaya langsung dan tidak langsung;
- g) Menyelenggarakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman yang telah ditetapkan;
- h) Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan;
- i) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- j) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3). Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga, peralatan, perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta mengelola administrasi kepegawaian. Yang mana Uraian Tugas Sub Bagian Umum Perlengkapan dan Kepegawaian meliputi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Umum Kepegawaian.
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bagian umum dan Kepegawaian sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;

- f) Menyiapkan rencana kebutuhan, pengembangan dan mutasi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g) Melaksanakan urusan surat-menyurat dan pengadaan naskah dinas;
- h) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- i) Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, perjalanan dinas dan keprotokolan;
- j) Menyiapkan data dan membuat laporan kepegawaian;
- k) Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- l) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- m) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.

g. Bidang Pencegahan dan Kesiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana. Secara rinci uraian tugas Bidang Pencegahan dan Kesiagaan adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- 2). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana.
- 3). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pencegahan bencana.
- 4). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan

mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.

- 5). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
- 6). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana.
- 7). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan mitigasi bencana.
- 8). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Pencegahan dan Kesiagaan BPBD ini dilengkapi dengan 2 (dua) Seksi yaitu :

d) Seksi pencegahan

Sub bidang pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana penanggulangan bencana, memfasilitasi upaya pengurangan resiko bencana, penegakan tata ruang dan penerapan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Seksi Pencegahan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Pencegahan;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f) Melakukan identifikasi dan pengenalan secara pasti terhadap sumber bahaya atau ancaman bahaya;
- g) Melaksanakan kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- h) Melakukan pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- i) Melakukan koordinasi pengelolaan tata ruang dan lingkungan hidup;
- j) Melaksanakan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
- k) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- l) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

e) Seksi kesiapsiagaan

Sub bidang kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana, pengembangan dan peringatan dini dan penyelenggaraan kegiatan mitigasi bencana serta bimbingan teknis penanggulangan bencana. Seksi Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang kesiapsiagaan;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f) Menyiapkan penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
- g) Menyiapkan pengorganisasian, pemasangan dan penguji peringatan dini;
- h) Menyiapkan penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- i) Menyiapkan pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
- j) Menyiapkan lokasi evakuasi;
- k) Melakukan penyusunan data akurat, informasi dan pemutahiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- l) Melaksanakan penyediaan dan penyiapan lahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana;
- m) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- n) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

h. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan

kebutuhan hidup dasar dan logistik pada saat tanggap darurat. Secara rinci uraian tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.
- 2). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.
- 3). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
- 4). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyelamatan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- 5). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- 6). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- 7). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.
- 8). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD ini dilengkapi dengan 2 (dua) Seksi yaitu :

- 1). Seksi kedaruratan

Sub bidang kedaruratan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian keadaan darurat, memfasilitasi pengeralahan sumber daya untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana. Seksi Kedaruratan mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Kedaruratan;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f) Menyiapkan serangkaian kegiatan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
- g) Melakukan upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
- h) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- i) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

2). Seksi logistik

Sub bidang logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian tingkat kerusakan akibat bencana, perlindungan kelompok rentan, pemenuhan kebutuhan dasar dan logistik. Seksi Logistik mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bagian Logistik;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- c) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- d) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- e) Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik;
- f) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- g) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- h) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

i. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan akibat bencana. Secara rinci uraian tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah sebagai berikut :

- 1). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan perbaikan lingkungan.
- 2). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi sarana dan prasarana umum.
- 3). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis.

- 4). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial ekonomi
- 5). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan sosial budaya.
- 6). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan sosial.
- 7). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan.
- 8). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan pelayanan publik.
- 9). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pemulihan keamanan serta ketertiban.
- 10). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan.
- 11). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat.
- 12). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
- 13). Menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan peningkatan fungsi pelayanan

publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

- 14). Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD ini dilengkapi dengan 2 (dua) Seksi yaitu :

- 1). Seksi rehabilitasi

Sub bidang rehabilitasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi rehabilitasi kerusakan akibat bencana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama perbaikan lingkungan, prasarana dan prasarana umum dan keagamaan, pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya, fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan masyarakat, keamanan dan ketertiban. Seksi Rehabilitasi mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Rehabilitasi;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;
- f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rehabilitasi dan penanganan pasca bencana;

- g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang bencana pada saat rehabilitasi penanganan pengungsi;
- i) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- j) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

2). Seksi rekonstruksi

Sub bidang rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi rekonstruksi sosial, ekonomi, budaya dan sarana prasarana, memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat, peningkatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Seksi Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a) Menyiapkan rencana kegiatan Sub Bidang Rekonstruksi;
- b) Menyusun laporan hasil kegiatan Sub Bidang sebagai bahan penyusunan laporan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- c) Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- d) Memberikan petunjuk dan bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
- e) Memeriksa hasil kerja bawahan;

- f) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan program rekonstruksi dan penanganan pasca bencana;
- g) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan dibidang bencana pada saat rekonstruksi penanganan pengungsi dengan instansi terkait, lembaga serta masyarakat;
- h) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana pada saat rekonstruksi;
- i) Mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan hasil kerja bawahan; dan
- j) Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan langsung.

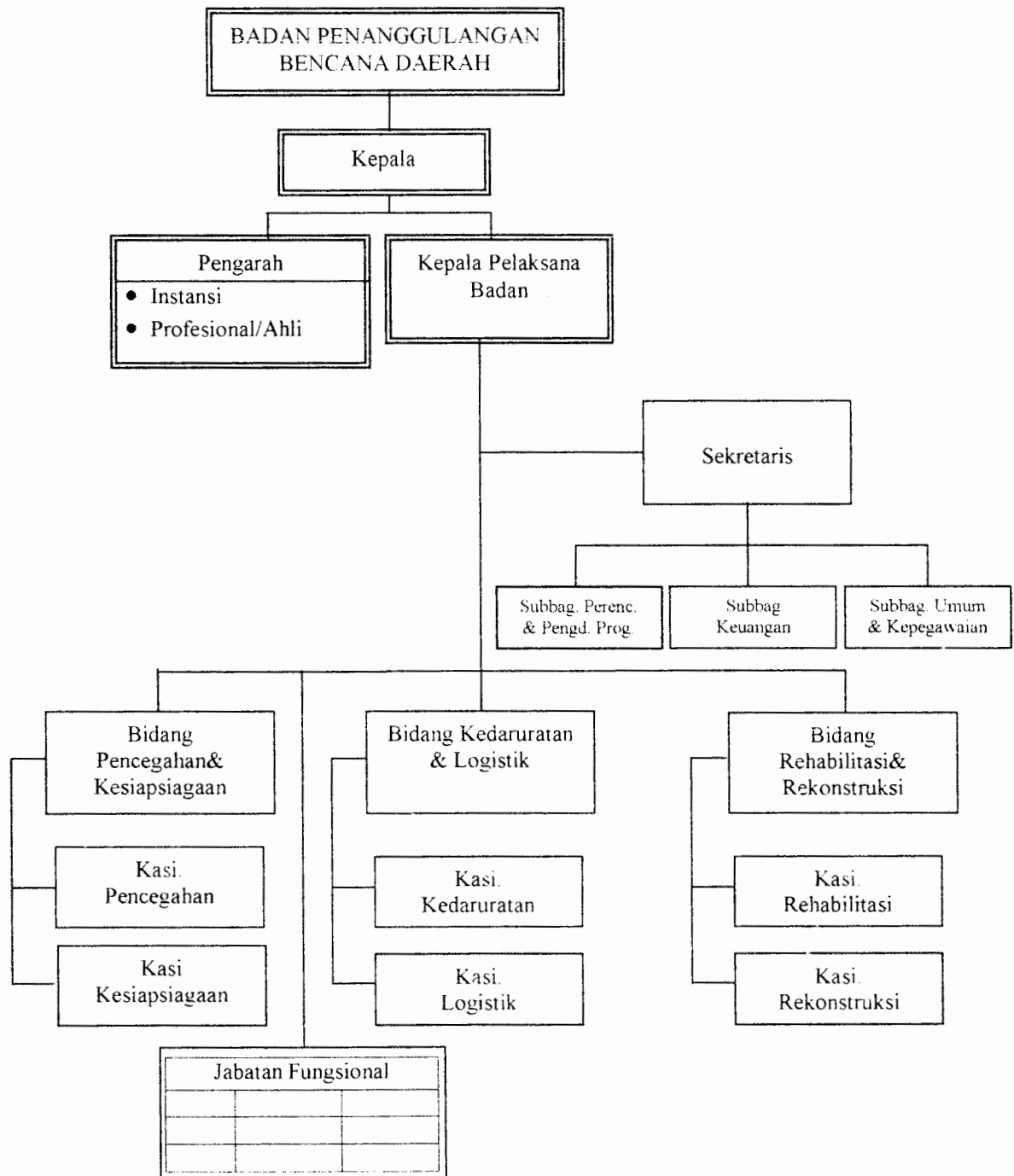
j. Satuan tugas

Satuan tugas mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas operasional Badan Penanggulangan Bencana.

k. Jabatan fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi teknis dalam kelancaran pelaksanaan organisasi penanggulangan bencana daerah.

Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.3. di bawah ini.



Gambar 4.3. Struktur Organisasi

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada tahun 2011 membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dengan pertimbangan perlu adanya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Lamandau.

Dimana dalam kelembagaannya BPBD Kabupaten Lamandau merupakan satuan kerja perangkat daerah yang masih baru sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil masih harus disempurnakan seiring berjalannya proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari BPBD Kabupaten Lamandau. Arah kebijakan dalam pengambilan keputusan pada BPBD Kabupaten Lamandau tertuang dalam renstra yang mana Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011-2013 merupakan implementasi dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2013, yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dalam Renstra dijabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikasi program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun ke depan dan

dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Berdasarkan penelitian masih terdapat beberapa program kegiatan yang belum terlaksana dapat dilihat pada misi BPBD Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kemampuan SDM (Aparatur dan Masyarakat) untuk menunjang penguasaan teknologi dan rekayasa di bidang penanggulangan bencana.
- b. Menetapkan standar, kebutuhan, dan prosedur penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- c. Mengembangkan pemanfaatan teknologi pencegahan, kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi untuk menghadapi ancaman dan resiko bencana.
- d. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- e. Memenuhi hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum. serta melaksanakan pemulihan kondisi dari dampak bencana.
- f. Mengembangkan, meningkatkan dan Menggalang kemitraan dengan masyarakat di bidang tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

2. Dalam pelaksanaan program kegiatan terdapat beberapa kendala dan pendukung implementasi kebijakan internal dan eksternal, yaitu :

a. Kendala Implementasi Kebijakan Internal

Untuk mendeskripsikan kendala implementasi kebijakan internal dapat diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dari fakta dilapangan sebagai berikut.

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mana SDM yang ada tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang pahamnya akan tupoksi masing-masing yang mengakibatkan kurang efektif pelaksanaan kegiatan/pelayanan pada BPBD Kabupaten Lamandau. Hal ini sesuai dengan penelitian Syaiful Anwar Djamil (2002) Judul : Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Daerah dan Restrukturisasi Organisasi Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim) dengan hasil penelitian, yaitu : Terdapat pengaruh positif antara variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah dengan variabel efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini terbukti bahwa variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah tepat mempengaruhi peningkatan efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Dari hasil penelitian kontribusi yang diberikan oleh variabel kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah daerah terhadap variabel terikatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah adalah sebesar 71,5 %.

Hal ini sesuai dengan pendapat Edward III dalam Leo (2012) mengemukakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

- 2) Banyaknya jabatan yang kosong pada BPBD Kabupaten Lamandau sehingga jalur koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terhambat dan tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang kosong tidak berjalan. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Risno Taweri (2005) Judul : Studi Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah dengan Pendekatan System Dynamics di Kabupaten Buru yaitu : Setelah ada kebijakan pengurangan jumlah organisasi (perampingan organisasi) dan pengurangan eselon, tidak terlalu mempengaruhi kinerja, produktivitas, kualitas, dan motivasi pegawai. Tetapi setelah ada kebijakan peningkatan kualitas dan motivasi pegawai, serta ditunjang dengan peningkatan penurunan belanja, maka kinerja dan produktivitas pegawai, dari tahun ke tahun semakin meningkat ke arah stabil bahkan melebihi stabil, hal ini disertai dengan peningkatan promosi pegawai untuk menduduki jabatan struktural (eselonisasi). Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 10 (sepuluh) jabatan yang tidak terisi dari 14 (empat belas) jabatan yang ada pada BPBD Kabupaten Lamandau yaitu : Sekretaris, Kepala

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Pencegahan, Seksi Kesiapsiagaan, Seksi Rekonstruksi, Seksi Kedaruratan, Seksi Logistik, Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan. Sesuai dengan pendapat Edward III dalam Leo (2012), sumber daya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumber daya mempengaruhi implementasi kebijakan salah satu indikator tersebut adalah Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan, tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya. Dengan adanya wewenang tanpa adanya pejabat yang mengisi jabatan tersebut sehingga wewenang tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak berjalan optimal.

- 3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan program kegiatan. Seperti yang dikemukakan Plh. Sekretaris BPBD yaitu “masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian,

tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik serta SDM yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinya”.

b. Pendukung Implementasi Kebijakan Internal

Untuk mendeskripsikan pendukung implementasi kebijakan internal dapat diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dari fakta dilapangan sebagai berikut.

- 1) penambahan tenaga harian lepas yang memiliki kompetensi, keahlian yang ada sehingga BPBD maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan struktur organisasi yang ada. Seperti yang dapat kita lihat pada table 4.6. Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Berdasarkan Golongan Ruang, dimana untuk PNS terdapat 21 (dua puluh satu) orang dan ditambah 12 (dua belas) tenaga harian lepas, dimana menurut Edward III dalam Leo (2012), Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan *implementor* saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah

kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.

- 2) Peningkatan profesionalisme aparatur BPBD serta melakukan inovasi pelayanan dan *Good Governance* (transparasi, partisipasi, akuntabilitas) guna memberikan pelayanan prima terhadap publik, seperti terdapat pada Tabel 4.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013 pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur terdapat dana untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal. Terdapat juga hal yang dilakukan oleh pemerintah untuk peningkatan profesionalisme yaitu pemberian insentif pada BPBD Kabupaten Lamandau berdasarkan peraturan bupati Lamandau Nomor 58 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Dilingkup Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2014, dalam pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah terdapat honor tim kegiatan sehingga dalam melaksanakan suatu kegiatan sudah ada anggaran untuk masing-masing PNS, pembayaran honor sesuai dengan jabatan didalam tim yang mana penganggaran honor tersebut disesuaikan dengan Standar Biaya Umum. Hal ini sesuai dengan faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Leo (2012) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan yaitu Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin

akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

- 3) Sosialisasi tentang kebencanaan yang dilaksanakan disetiap saat apabila ada kesempatan (musrenbang kecamatan, monev pasca bencana, monev daerah rawan bencana). Seperti terdapat pada Tabel 4.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Bidang Pencegahan Dan Kesiapansiagaan Tahun Anggaran 2011-2013 Terselenggaranya Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Tabel 4.11 Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013 yaitu Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, lahan dan Perkarangan, hal ini sesuai dengan pendapat dari Edward III dalam Leo (2012),. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauh mana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan salah satunya yaitu Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.

c. Kendala Implementasi Kebijakan Eksternal

Untuk mendeskripsikan kendala implementasi kebijakan Eksternal dapat diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dari fakta dilapangan sebagai berikut.

- 1) Tidak semua program kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran. Seperti ditegaskan oleh Edward III dalam Leo (2012) salah satu model implementasi adalah Sumber daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Salah satu sumber daya tersebut sumber daya financial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
- 2) Masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik serta SDM yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinya. Untuk itu Edward III mengemukakan melalui pendapatnya ditegaskan oleh Edward III dalam Leo (2012) bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack attention to implementation* bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan

dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, sikap, dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksanaan kebijakan jadi dengan adanya Komunikasi, keberhasilan kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

- 3) Rendahnya pemahaman dan belum optimalnya peran serta masyarakat, organisasi pemuda, wanita, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan pihak swasta di Kabupaten Lamandau dalam Penanggulangan Bencana. Seperti dikemukakan oleh Edward III dalam Leo (2012) mengemukakan terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut salah satu indikator tersebut yaitu: Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miskomunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan, dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau harus berperan aktif dalam mensosialisasikan dalam Penanggulangan Bencana.

d. Pendukung Implementasi Kebijakan Eksternal

Untuk mendeskripsikan pendukung implementasi kebijakan Eksternal dapat diperhatikan pada implementasi kebijakan organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau, berdasarkan pembahasan diatas dapat diamati dari fakta dilapangan sebagai berikut.

- 1) Dukungan dan Koordinasi antar pihak Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada data Tabel 4.11 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2011-2013, dapat dilihat peran serta dalam penganggaran pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan.
- 2) Optimalisasi partisipasi peran SKPD terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau. Hal ini dapat dilihat pada saat terjadi bencana SKPD yang terkait akan bersama-sama memberikan bantuan dimana BPBD sebagai koordinator dalam mengatasi bencana di Kabupaten Lamandau dimana BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah sehingga memudahkan dalam melaksanakan koordinasi dilapangan.
- 3) Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Lamandau yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan sehingga dalam penerapan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan program dari pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian oleh Salim Kamaluddin (2010) Judul : Analisis Implementasi Perda No.15/2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah di Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana hasil penelitian tersebut mengemukakan : a. Belum mendukung sepenuhnya implementasi Perda dengan baik akibat dari kesalahan formulasi

kebijakannya. b. Perlu dilakukannya evaluasi untuk direvisi kembali perangkat organisasi daerah sesuai Perda No. 15/2008 baik jumlah dinas maupun jabatan strukturak eselon III dan IV untuk diperkecil atau digabungkan. Hal ini sesuai dengan penelitian Porte dan Denhart dalam Liliweri (1997) mengemukakan bahwa :

“Derajat kelenturan atau fleksibilitas organisasi dapat digambarkan dengan proses penyesuaian organisasi terhadap perubahan-perubahan dalam organisasi”.

Salah satu kesukaran dalam menentukan tingkat kelenturan organisasi adalah sejauh mana koordinasi diantara satuan kerja dalam organisasi sehingga dapat bertahan dan menyesuaikan diri dengan perubahan yang datang dari luar. Oleh karena itu akibat adanya kelenturan itu sendiri maka setiap organisasi harus memiliki suatu “strong point” agar dia dapat bertahan terhadap perubahan yang melandanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah dalam penelitian ini, terdapat 4 (empat) permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor komunikasi pada BPBD Kabupaten Lamandau sudah baik dilihat dari terpenuhinya tiga indikator keberhasilan variabel komunikasi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.
2. BPBD Kabupaten Lamandau masih terdapat kekurangan sumber daya yang ada, Sumber daya tersebut antara lain :
 - a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang mana SDM yang ada tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang pahamnya akan tupoksi masing-masing yang mengakibatkan kurang efektif pelaksanaan kegiatan/pelayanan pada BPBD Kabupaten Lamandau.
 - b. Banyaknya jabatan yang kosong pada BPBD Kabupaten Lamandau sehingga jalur koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan terhambat dan tugas pokok dan fungsi pada jabatan yang kosong tidak berjalan.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan sehingga kurang efektif dalam pelaksanaan program kegiatan.
3. Dalam pelaksanaan disposisi / sikap birokrasi terdapat hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan dikarenakan kurangnya SDM pada BPBD Kabupaten Lamandau sehingga pelaksanaan kebijakan tidak maksimal.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak perlu dilakukan perubahan.

B. SARAN

1. Perlu dilaksanakan pengisian jabatan yang kosong pada BPBD Kabupaten Lamandau, dan perlu dilaksanakan rapat mingguan atau bulanan agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar.
2. Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
3. Menugaskan PNS BPBD Kabupaten Lamandau untuk mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan penanggulangan Bencana baik pelatihan teknis maupun non teknis.
4. Perlunya dilaksanakan sosialisasi tentang program-program BPBD Kabupaten Lamandau kepada masyarakat dan perlunya keterbukaan informasi publik dengan kemudahan mengakses data tentang BPBD Kabupaten Lamandau.
5. Perlunya dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang Kepala Daerah, DPRD dan SKPD terkait dengan memaparkan program-program dan hal-hal yang menghambat kinerja dari BPBD Kabupaten Lamandau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2013). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Jakarta : Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik, (2012). Buku Putih Sanitasi Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau.
- Badan Pusat Statistik, (2012). Kabupaten Lamandau Dalam Angka 2012/2013. Nanga Bulik : Badan Pusat Statistik Kabupaten Lamandau.
- Elu, W.B. dan Purwanto, A. J. (2011). Inovasi dan Perubahan Organisasi. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Iswanto, Y. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Kismartini. (2012). Analisis Kebijakan Publik. Banten : Universitas Terbuka.
- Liliweri, A. (1997). Sosiologi Organisasi. Bandung : PT. Citra Aditya Karya.
- Moleong, L. J. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, Q. (2012). Manajemen Strategik Organisasi Publik. Banten : Universitas Terbuka.
- Sugiyono. (2006), Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Jakarta : CV Alfabeta.
- Prasojo, E. (2012). Pemerintahan Daerah. Banten : Universitas Terbuka.
- Program Pascasarjana Universitas Terbuka Indonesia, (2013). Panduan Penulisan Proposal dan Tugas Akhir Program Magister (TAPM). Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.

Sumber-sumber lain :

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (2010). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia (2010). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Jakarta : Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau (2011). Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau. Nanga Bulik : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Sumber Internet :

Edward,G. (2011, 17 Juni) Implementasi kebijakan. Diambil 17 April 2014, dari situs world wide web : <http://arenakami.blogspot.com>.

Edward,G. (2014, 20 April 2010) Teori Implementasi kebijakan. Diambil 21 April 2014, dari situs world wide web : <http://arenakami.blogspot.com>.

Lampiran Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA I *Counter Information*

1. Narasumber I : **Kepala Pelaksana BPBD**
2. Narasumber II : **Sekretaris BPBD**

Identitas :

- a. Tingkat Pendidikan : S-1
- b. Jabatan/Pekerjaan : Ka. Pelaksana BPBD
- c. Alamat : Komplek Bukit Hibul

1. Apakah pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah berjalan dengan baik ?
2. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan BPBD Kabupaten Lamandau ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau yang belum terisi ?
4. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
5. Menurut Bapak apakah bencana alam di Kabupaten Lamandau sangat banyak dan bersekala besar ?
6. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum tercover pada kegiatan ?
7. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
8. Menurut Bapak sudah cukupkah Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
9. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di tiap bagian ?
10. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Lamandau?
11. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
12. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya ?
13. Sudah idealkah program kegiatan yang dianggarkan pada kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau ?

JAWAB :

1. Ya, sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kriteria prosedur yang berlaku, walaupun ada sana sini yang kurang menyesuaikan dengan keterbatasan SDM.

2. Masih kurang ideal dikarenakan kedudukan Pemadam Kebakaran di BPBD sehingga pada Perda tidak ada yang tertulis bahwa Damkar di bawah salah satu bidang.
3. Dengan banyaknya jabatan yang masih kosong tidak terisi sangat mempersulit dalam forasis penyelesaian tugas-tugas/pekerjaan, sehingga kontrolnya / koordinasi suatu suatu pekerjaan kurang berjalan dengan baik tidak melewati tahapan/jenjang yang ada.
4. Ya, sudah maksimal disesuaikan dengan dengan jumlah personil yang ada, yang diakui ada sana sini yang kurang.
5. Untuk bencana yang ada di Kabupaten Lamandau cukup banyak, namun skalanya tidak besar tapi sangat merugikan masyarakat dengan terkena musibah tersebut, sehingga perlu penanganannya dengan baik dan komprehensif.
6. Program yang belum tercover di BPBD yaitu :
 - a. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya sadar akan bahaya kebakaran hutan, lahan dan pekarangan yang dilakukan dengan sengaja.
 - b. Membentuk tiap-tiap kecamatan untuk apa tangguh dan peduli terhadap bencana.
7. Untuk damkar masih belum sesuai karena perda pembentukan BPBD tidak ada mencantumkan pasal yang mendudukan damkar di bawah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, mungkin pada waktu yang dekat ini ada rapat untuk membahas masalah kedudukan damkar di BPBD.
8. Sangat kurang dan untuk sekarang ini kami sama-sama / bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada.
9. Sudah, kemaren tahun 2013 di Kecamatan Bulik untuk tahun 2014 direncanakan di Kecamatan Bulik Timur jadi kegiatannya 1x setiap tahun menyesuaikan dana yang ada.
10. Pelatihan yang sudah dilaksanakan :
 - 1) Pendidikan dasar memadamkan kebakaran. Untuk PND Damkar sudah bersertifikat dasar.
 - 2) Pelatihan tata acara praktek memasang tenda – tenda dan alat – alat yang lainnya.
11. Yang menjadi kendala pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Lamandau :
 - a. Kurangnya SDM
 - b. Kurang kompak elemen lembaga terkait
 - c. Peralatan yang tidak memadai untuk menunjang kegiatan yang ada
12. Untuk kedepan supaya BPBD dapat eksis :
 - SDM yang kurang agar dapat dilengkapi/diisi
 - Perlengkapan / peralatan Damkar supaya diperbaharui
 - Dalam penanganan bencana di semua elemen terkait kompak dan tangguh
 - Terakhir dukungan dana
13. Belum semua program kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau dapat tertampung pada APBD dikarenakan keterbatasan anggaran, untuk itu BPBD Kabupaten Lamandau melaksanakan kegiatan secara bertahap tiap tahunnya.

PEDOMAN WAWANCARA I

Counter Information

1. Narasumber I : Kepala BPBD
2. Narasumber II : **Sekretaris BPBD**

Identitas :

- a. Tingkat Pendidikan : Stara 1 (S.1)
- b. Jabatan/Pekerjaan : Plh. Sekretaris
- c. Alamat :

1. Apakah pelaksanaan kegiatan pada BPBD sudah berjalan dengan baik ?
2. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan BPBD Kabupaten Lamandau ?
3. Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau yang belum terisi ?
4. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
5. Menurut Bapak apakah bencana alam di Kabupaten Lamandau sangat banyak dan bersekala besar ?
6. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum tercover pada kegiatan ?
7. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
8. Menurut Bapak sudah cukupkah SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
9. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di tiap bagian ?
10. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Lamandau?
11. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
12. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya ?

JAWAB :

1. Pelaksanaan kegiatan BPBD ditinjau dari SDM yang ada kurang berjalan dengan baik, dikarenakan jumlah SDM yang kurang / minim sehingga target capaian per triwulan belum tercapai.
2. Ya, sudah sesuai.
3. Terkait beberapa jabatan yang masih kosong, menghambat kelancaran proses birokrasi dan tata laksana terpakai BPBD sendiri, karena jabatan – jabatan yang saat ini kosong

adalah jabatan strategis / kelancaran pelaksanaan tugas BPBD; akibatnya tugas tersebut dibebankan kepada pejabat yang lain yang ada di BPBD sehingga kurang efektif.

4. Belum, karena SDM yang menguasai pekerjaan dan tugasnya serta terampil masih kurang.
5. Bencana alam di Kabupaten Lamandau tergolong rendah dan dalam skala kecil
6. Program BPBD yang penting yang saat ini belum tercover adalah kegiatan pelatihan Dala (Damage and tenses assessment) tingkat kecamatan, untuk melatih aparat desa/kecamatan untuk melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian pasca bencana sebagai perpanjangan tangan BPBD di kecamatan. Pelatihan RTC (Tim Reaksi Cepat), pelatihan DAMKAR, pengadaan DAMKAR mini, workshop, pembangunan gudang logistik.
7. Tidak, DAMKAR seharusnya merupakan UPT.
8. Tidak dan belum cukup, sangat minim, yang terutama adalah SDM yang ada tidak semua terampil dan paham akan tugasnya.
9. Sosialisasi tentang kebencanaan telah dilaksanakan disetiap saat apabila ada kesempatan (musrenbang kecamatan, monev pasca bencana, monev daerah rawan bencana). Perlu dikoreksi : BPBD tidak hanya menangani bencana yang diakibatkan oleh alam tetapi juga non alam seperti : kerusakan, kebakaran akibat kelalaian manusia, wabah penyakit, perang antar suku/etnis.
10. Pelatihan yang sudah dilaksanakan adalah pelatihan penanganan kebakaran yang dilakukan di perusahaan sawit dan kayu di Kabupaten Lamandau.
11. Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih belum berubahnya cara berpikir tingkat eksekutif bahwa saat ini bencana bukan dihadapi hanya pada saat kejadian, tetapi prinsip kebencanaan saat ini adalah bagaimana meminimalkan kerusakan akibat bencana sebelum bencana terjadi, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, tidak lengkap dan dalam kondisi kurang baik serta SDM yang kurang terampil dan mengerti akan tupoksinya.
12.
 - a. Perubahan pola pikir tentang kebencanaan dimana saat ini yang harus dilaksanakan adalah peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan sebelum terjadi bencana.
 - b. Sarana dan prasarana yang mendukung yang dalam kondisi prima dan siap apabila dibutuhkan.
 - c. SDM yang terampil dengan mengikuti pelatihan bidang kebencanaan.
 - d. SDM yang cukup pada tiap bidang di BPBD Kabupaten Lamandau.
 - e. Penambahan Tenaga Harian Lepas guna membantu pelaksanaan kegiatan.

PEDOMAN WAWANCARA II

Counter Information

1. Narasumber III : **Kabag Organisasi**
2. Narasumber IV : **Kabag Hukum**

Identitas:

- a. Tingkat Pendidikan : S.1
- b. Jabatan/Pekerjaan : **Kabag Organisasi**
- c. Alamat : Nanga Bulik, Perumahan Bukit Hibul

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau yang belum terisi ?
3. Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja, memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada SKPD terkait ?
4. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten Lamandau ?

JAWAB :

1. Sudah sesuai, Karena pembentukan BPBD Kabupaten Lamandau telah didasari oleh Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang mana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
2. Jabatan yang masih kosong dikarenakan masih kurangnya SDM yang ada di Kabupaten Lamandau.
3. Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penyebaran penduduk yang semakin pesat maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

4. Untuk sekarang kinerja BPBD cukup maksimal dengan keterbatasan SDM yang ada.
5. Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga mempermudah alur kordinasi

PEDOMAN WAWANCARA II

Counter Information

1. Narasumber III : Kabag Organisasi
 2. Narasumber IV : **Kabag Hukum**

Identitas:

- a. Tingkat Pendidikan : S.1
 b. Jabatan/Pekerjaan : **Kabag Hukum**
 c. Alamat : Nanga Bulik

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
2. Bagaimana tanggapan Bapak terkait beberapa jabatan di BPBD Kabupaten Lamandau yang belum terisi ?
3. Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja, memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada SKPD terkait ?
4. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
5. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten Lamandau ?

JAWAB :

1. Sudah sesuai, karena BPBD merupakan sebuah kerja yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kebencanaan BPBD di Kabupaten Lamandau sangat besar dalam rangka kesiap siagaan bencana mengingat Kabupaten Lamandau merupakan daerah rawan bencana banjir, kebakaran dan longsor karena daerah yang geografisnya terdiri dari perbukitan, hutan dan sungai.
2. Jabatan yang masih kosong supaya cepat diisi, karena setiap organisasi yang personilnya masih kurang dapat mengakibatkan lemahnya kualitas kerja organisasi tersebut. Solitnya suatu organisasi apabila didukung dengan SDM yang memadai.
3. Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penyebaran penduduk yang semakin pesat maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

4. Untuk sekarang kinerja BPBD cukup maksimal dengan keterbatasan SDM yang ada.
5. Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga mempermudah alur kordinasi

PEDOMAN WAWANCARA III

Counter Information

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Narasumber V | : | Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 2. Narasumber VI | : | Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan |

Identitas:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| a. Tingkat Pendidikan | : | S.1 |
| b. Jabatan/Pekerjaan | : | Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| c. Alamat | : | Jalan Desa Bina Bhakti |
1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
 2. Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja, memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada SKPD terkait ?
 3. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten Lamandau ?
 4. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD Kabupaten Lamandau, apakah sudah sesuai Pemadam Kebakaran ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
 5. Menurut bapak permasalahan apa yang sering dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ?
 6. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya ?

JAWAB :

1. Menurut pendapat saya Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai, karena sudah sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terkait tentang keberadaan Pemadam Kebakaran (Damkar) yang mana BPBD Kabupaten Lamandau menginginkan dilaksanakan perubahan SOTK pada BPBD Kabupaten Lamandau dengan memasukkan fungsi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT).
Menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan rapat tentang kelembagaan diprovinsi Kalimantan Tengah di peroleh kesimpulan : Untuk penyusunan Organisasi Perangkat Daerah harus sesuai dengan peraturan yang menaungi penyusunan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah tersebut dalam hal ini BPBD Kabupaten Lamandau, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak terdapat fungsi dari UPT sehingga dalam Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak dapat dirubah.

Untuk Fungsi Pemadam Kebakaran pada tahun 2011 telah dikonsultasikan dengan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang kedudukan Pemadam Kebakaran di Bawah Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan dimasukkan pada Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok & Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dan dibunyikan pada pasal 18 yaitu :

Bagian Keempat
Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Pasal 18

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pencegahan, dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan di bidang pemadaman kebakaran, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemadaman kebakaran, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. Melaksanakan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dalam pemadaman kebakaran, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. Melakukan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan pemadaman kebakaran, pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat ; dan
 - e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penyebaran penduduk yang semakin pesat maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
 3. Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga mempermudah alur kordinasi

4. Apabila melihat dari jumlah SDM yang ada dan memperkecil penggunaan anggaran maka DAMKAR sudah sesuai berada dibawah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD. Namun apabila ingin memperluas jangkauan dan lebih pada system pola kerja yang maksimal maka alangkah lebih baik DAMKAR dalam bentuk UPTB.
5. - Secara organisasi tentunya permasalahan yang dihadapi adalah masih lemah dan kurangnya SDM baik pada jabatan structural maupun jabatan fungsionalnya.
 - Sarana dan prasarana yang mendukung masih kurang misalnya mobilitas siaga bencana, peralatan lain yang mendukung siaga bencana, masih kurangnya mobilitas DAMKAR.
6. - Pengisian personil pada BPBD sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
 - Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - Penambahan mobilitas untuk siaga bencana dan alat lain yang berhubungan dengan bencana yang memadai termasuk DAMKAR.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas personil melalui diklat dan pelatihan.

PEDOMAN WAWANCARA III

Counter Information

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. Narasumber V | : | Kasubbag Kelembagaan dan Analisis Jabatan |
| 2. Narasumber VI | : | Kasubbag Peraturan Perundang-Undangan |

Identitas:

- | | | |
|-----------------------|---|---------------------------------------|
| a. Tingkat Pendidikan | : | S.1 |
| b. Jabatan/Pekerjaan | : | Kasubbag Peraturan Perundang-undangan |
| c. Alamat | : | Jalan Desa Bina Bhakti |

1. Menurut Bapak apakah Kelembagaan tentang BPBD sudah sesuai dengan kebutuhan rill Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
2. Menurut pendapat Bapak BPBD Kabupaten Lamandau dilihat dari beban kerja, memang harus dibentuk berupa badan atau dibentuk berupa UPT yang melekat pada SKPD terkait ?
3. Bagaimana pendapat bapak tentang organisasi dan tatakerja BPBD Kabupaten Lamandau ?
4. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD Kabupaten Lamandau, apakah sudah sesuai Pemadam Kebakaran ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
5. Menurut bapak permasalahan apa yang sering dihadapi pada pelaksanaan kegiatan ?
6. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya ?

JAWAB :

1. Sudah sesuai, karena BPBD merupakan sebuah kerja yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kebencanaan BPBD di Kabupaten Lamandau sangat besar dalam rangka kesiap siagaan bencana mengingat Kabupaten Lamandau merupakan daerah rawan bencana banjir, kebakaran dan longsor karena daerah yang geografisnya terdiri dari perbukitan, hutan dan sungai.
2. Melihat dari luasnya Kabupaten Lamandau dan penyebaran penduduk yang semakin pesat maka keberadaan BPBD sangat dibutuhkan, jadi harus berbentuk badan. Bukan melekat pada SPDK yang berbentuk UPTB. Dengan berbentuk badan maka mempermudah akses jangkauan koordinasinya baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
3. Cukup maksimal sesuai dengan yang diamanatkan dalam pola PP 31 Tahun 2000 Namun untuk jabatan strukturnya perlu disesuaikan dengan pemerintah provinsi sehingga mempermudah alur kordinasi

4. Apabila melihat dari jumlah SDM yang ada dan memperkecil penggunaan anggaran maka DAMKAR sudah sesuai berada dibawah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD. Namun apabila ingin memperluas jangkauan dan lebih pada system pola kerja yang maksimal maka alangkah lebih baik DAMKAR dalam bentuk UPTB.
5. - Secara organisasi tentunya permasalahan yang dihadapi adalah masih lemah dan kurangnya SDM baik pada jabatan structural maupun jabatan fungsionalnya.
 - Sarana dan prasarana yang mendukung masih kurang misalnya mobilitas siaga bencana, peralatan lain yang mendukung siaga bencana, masih kurangnya mobilitas DAMKAR.
6. - Pengisian personil pada BPBD sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
 - Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.
 - Penambahan mobilitas untuk siaga bencana dan alat lain yang berhubungan dengan bencana yang memadai termasuk DAMKAR.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas personil melalui diklat dan pelatihan.

PEDOMAN WAWANCARA IV

Counter Information

- 1. Narasumber VII : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- 2. Narasumber VIII : Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 3. Narasumber IX : **Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Identitas:

- a. Tingkat Pendidikan : Strata 1 (S-1)
- b. Jabatan/Pekerjaan : Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- c. Alamat : Jalan Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul
Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

- 1. Apakah pelaksanaan kegiatan BPBD pada bidang bapak sudah berjalan dengan baik ?
- 2. Pelatihan apasajakan yang sudah dilaksanakan pada bidang saudara ?
- 3. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
- 4. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?
- 5. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
- 6. Menurut Bapak sudah idealkan Sumber Daya Manusia (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
- 7. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di bidang saudara ?
- 8. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Lamandau ?
- 9. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
- 10. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya?

JAWAB :

- 1. Pelaksanaan kegiatan Bidang RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) sudah berjalan baik.
- 2. Sampai saat ini untuk Bidang RR masih belum ada pelatihan yang dilaksanakan.
- 3. Belum maksimal, hal ini akibat dari kurangnya jumlah SDM yang terampil dan mengerti benar akan tugasnya. Sarpras yang masih belum lengkap dan mendukung, jabatan-jabatan yang masih kosong.
- 4. Yang belum tercover pada BPBD Kabupaten Lamandau kegiatannya : Pembangunan workshop, Pelaksanaan Pelatihan Dala (Damage & losses assessment), pelatihan TRC, Pengadaan Damkar Mini, pembangunan Gudang Logistik dan Pelatihan/Demo Penanganan Bencana Banjir dan Kebakaran.

5. Tidak, Tim Damkar dibuat dalam bentuk UPT.
6. Belum, dikarenakan SDM yang ada masih banyak yang tidak terampil dalam penggunaan teknologi dan kurang pahami akan tupoksi masing-masing.
7. Sudah
8. Masih belum ada pelatihan yang dilaksanakan sampai saat ini.
9. Kendala-kendala yang dihadapi BPBD Kabupaten Lamandau :
 - a. SDM yang kurang terampil, cekatan
 - b. Jumlah SDM yang kurang
 - c. Sarpras yang masih belum memadai dan lengkap
 - d. Salahnya persepsi pihak eksekutif tentang kebencanaan, bahwa kebencanaan saat ini berprinsip untuk meminimalkan kerusakan sebelum bencana terjadi.
10. a. Perhatian yang lebih serius terhadap penanggulangan bencana dan mengubah pola pikir yang terbangun saat ini.
 - b. Terjadinya Sarpras yang lengkap dan dalam kondisi baik serta terpelihara sehingga tetap dalam kondisi siap pakai.
 - c. Jumlah SDM yang terampil, cerdas dan cekatan ditambah.
 - d. Segera mengisi jabatan-jabatan yang kosong saat ini.

PEDOMAN WAWANCARA IV
Counter Information

- 1. Narasumber VII : **Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**
- 2. Narasumber VIII : Bidang Kedaruratan dan Logistik
- 3. Narasumber IX : Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi

Identitas:

- a. Tingkat Pendidikan : S-I
- b. Jabatan/Pekerjaan : Plt. Kasi Kesiapsiagaan
- c. Alamat : Perum BTN Kujan

- 1. Apakah pelaksanaan kegiatan BPBD pada bidang bapak sudah berjalan dengan baik ?
- 2. Pelatihan apasajakan yang sudah dilaksanakan pada bidang saudara ?
- 3. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
- 4. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?
- 5. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
- 6. Menurut Bapak sudah idealkan SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
- 7. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di bidang saudara ?
- 8. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Lamandau ?
- 9. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
- 10. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya?

JAWAB :

PEDOMAN WAWANCARA IV

Counter Information

1. Narasumber VII : Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
2. Narasumber VIII : **Bidang Kedaruratan dan Logistik**
3. Narasumber IX : Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Identitas:

- a. Tingkat Pendidikan : S-1
- b. Jabatan/Pekerjaan : **Bidang Kedaruratan dan Logistik**
- c. Alamat : Perum BTN Kujan

1. Apakah pelaksanaan kegiatan BPBD pada bidang bapak sudah berjalan dengan baik ?
2. Pelatihan apasajakan yang sudah dilaksanakan pada bidang saudara ?
3. Menurut Bapak apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal ?
4. Menurut Bapak program apasajakah yang harus dibuat oleh BPBD Kabupaten Lamandau yang belum tercover pada kegiatan di BPBD ?
5. Menurut Bapak Pemadam Kebakaran (damkar) pada BPBD apakah sudah sesuai ditempatkan dibawah bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan ?
6. Menurut Bapak sudah idealkan SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
7. Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tentang bencana alam di bidang saudara ?
8. Pelatihan apa saja yang sudah dilaksanakan, untuk menunjang pelaksanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Lamandau ?
9. Menurut Bapak apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
10. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya?

JAWAB :

1. Sudah berjalan dengan baik
2. - Diklatsar Pemadam Kebakaran di UPT Damkar DKI Jakarta
- Diklat manajemen PB
- Simulasi operasional peralatan PB
3. Sudah cukup maksimal, karena walaupun keterbatasan personel BPBD Lamandau kinerjanya sudah cukup baik terbukti responsive dalam menghadapi PB.
4. - Penyusunan Peta Rawan Bencana
- Penyusunan Rekontijensi Banjir
- Penyusunan Rekontijensi Kebakaran
5. Belum. Damkar BPBD sebaiknya dibuat UPT atau bidang tersendiri, agar kinerjanya lebih efektif dan efisien.
6. Belum. Masih terbatas.

7. Sudah pada tahun 2013 di PT. Pilar dan pada tahun 2014 ini direncanakan di PT. SMU.
8. Pelatihan PRB (Pengurangan Resiko Bencana)
9. Keuangan Daerah (APBD) yang minim.
10. - Perlu peningkatan kreatifitas SDM melalui Diklat dan BinteK
 - Anggaran APBD untuk BPMD Kabupaten Lamandau perlu ditambah sesuai kebutuhan.

PEDOMAN WAWANCARA V
(Counter Information)

Narasumber X : Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program
Identitas :
a. Tingkat Pendidikan : SMU
b. Jabatan / Pekerjaan : Pelaksana pada Perencanaan dan Pengendalian Program
c. Alamat : Jl. Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga
Bulik Kabupaten Lamandau

Pertanyaan :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan kegiatan pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
2. Menurut Saudara apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan fungsinya ?
3. Menurut Saudara apakah kinerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah maksimal dengan mengacu pada perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian Program ?
4. Menurut Saudara apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
5. Masukkan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya ?
6. Bagaimanakah hubungan kerjasama dengan SKPD lain dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana?

Jawaban :

1. - Untuk pelaksanaan perencanaan kegiatan di BPBD Kabupaten Lamandau belum begitu berjalan dengan lancar, masih banyak kekurangan dalam penyusunan dan perumusan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan karena belum ada Kasubbag Perencanaan dan Pengendalian Program.
 - Fasilitas yang belum memadai dan sdm yang masih kurang dibagian perencanaan, bagian perencanaan mencoba dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan kedepannya dengan apa adanya.
2. - Untuk pelaksanaan kegiatan yang ada di BPBD sudah sesuai dengan apa yang diusulkan oleh Bidang-Bidang dan Bagian Sekretariat, semuanya itu sudah tertuang didalam Renja, RKA dan DPA BPBD Kabupaten Lamandau.
3. - Untuk kinerja di BPBD belum begitu berjalan maksimal, masih banyak kekurangan didalamnya. Untuk mengacu pada perencanaan sudah maksimal walaupun secara bertahap, karena perencanaan yang sudah dibuat merupakan dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dikerjakan kedepannya.
4. - Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dilapangan dalam penanganan/ penanggulangan bencana.
 - Masih kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan administrasi pada BPBD.
 - Minimnya pengetahuan tentang penanggulangan bencana.
 - Masih kurangnya diklat teknis pada bidang-bidang tertentu. Perlunya penambahan personel pada Damkar.

5. - Perlunya penambahan personel dan damkar.
 - Perlunya penambahan PNS dan tenaga administrasi lainnya untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang ada di BPBD Kabupaten Lamandau.
 - Perlunya penambahan sarana dan prasarana damkar.
 - Perlunya penambahan sarana dan prasarana penunjang pada kantor BPBD Kabupaten Lamandau.
 - Perlunya penambahan operator komputer disetiap bidang-bidang dan bagian sekretariat.
6. BPBD Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan kerjasama dalam penanggulangan bencana juga berkoordinasi dengan SKPD yang berkaitan dengan bencana yang terjadi misalkan Bencana banjir Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lamandau memberikan bantuan berupa bantuan makanan kepada masyarakat.

PEDOMAN WAWANCARA VI

Counter Information

Narasumber XI . Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan

Identitas :

- a. Tingkat Pendidikan : SMK
- b. Jabatan/Pekerjaan : Pelaksana pada Bagian Kepegawaian
- c. Alamat : Jl. Sempalau Komplek Perkantoran Bukit Hibul
Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian pada BPBD Kabupaten Lamandau ?
2. Menurut Saudara apakah penempatan PNS sudah sesuai dengan bidang kerjanya ?
3. Menurut saudara struktur organisasi dan tata kerja BPBD Kabupaten Lamandau sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ?
4. Bagaimana tanggapan saudara terkait masalah kekosongan jabatan didalam BPBD Kabupaten Lamandau ?
5. Menurut Saudara apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lamandau ?
6. Masukan apa yang dirasa perlu untuk kemajuan BPBD Kabupaten Lamandau ke depannya ?

JAWAB :

1. Untuk pelaksanaan kepegawaian di BPBD Kabupaten Lamandau berjalan cukup baik dan lancar sesuai prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku dengan keadaan pegawai pada BPBD Kabupaten Lamandau sebanyak 21 Orang.
2. Ya sudah sesuai, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
3. a. Untuk struktur organisasi dalam hal ini yang menduduki jabatan belum sesuai, karena masih banyak jabatan yang kosong yang belum terisi, disebabkan terbatasnya Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.
b. Untuk Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah sesuai.
4. a. Akibatnya Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kurang optimal baik secara administrasi maupun teknis khususnya pada jabatan yang kosong.

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau untuk mencapai yang tepat, jabatan yang kosong pekerjaannya dihandle oleh pegawai / staf yang berada pada bidang atau sub.bagian tersebut.
5. Adapun kendala yang dihadapi sebagai berikut :
- a. Masih Terdapat 9 (Sembilan) jabatan struktur kosong yang belum terisi antara lain 1 (Satu) Sekretaris, 3 (Tiga) Kepala Sub Bagian dan 4 (Empat) Kepala seksi dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekretaris ;
 - Kabid. Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Kasubag Perencanaan dan Pengendalian Program;
 - Subbag Keuangan;
 - Subbag Umum,Kepegawaian dan Perlengkapan
 - Seksi Pencegahan
 - Seksi Kesiapsiagaan
 - Seksi Kedaruratan
 - Seksi Rekonstruksi
 - b. Terdapat 3 (tiga) pejabat struktural yang belum mengikuti diklat penjenjangan terdiri dari Diklat Pim III dan Diklat Pim IV
 - c. Kurangnya profesionalnya tenaga dalam pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan, perencanaan dan penanggulangan bencana
 - d. Masih kurangnya tenaga pelaksana pada setiap bidang maupun sub bagian
 - e. Kurangnya informasi yang tersedia
 - f. Kurangnya koordinasi dengan instansi yang terkait
 - g. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional
6. Masukan yang perlu untuk kemajuan BPBD adalah :
- a. Mengajukan surat permohonan pengisian formasi kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau
 - b. Mengajukan surat kepada Bupati Lamandau Up. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau agar mengalokasikan dana sesuai dengan jumlah PNS yang akan mengikuti Diklat Pim dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.
 - c. Mengoptimalkan tenaga-tenaga yang ada serta mengupayakan kerjasama dan partisipasi dari instansi SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
 - d. Mengupayakan pengiriman tenaga untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai bidang yang dibutuhkan.
 - e. Mengalokasikan dana dalam DPA BPBD Kabupaten Lamandau untuk memenuhi sarana dan prasarana penunjang kinerja yang masih belum tersedia
 - f. Mengoptimalkan dan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan baik.

PEDOMAN WAWANCARA VII
Counter Information

Narasumber XII : Masyarakat

Identitas :

- a. Tingkat Pendidikan : S-1
- b. Jabatan/Pekerjaan : Swasta
- c. Alamat : Jl. Gaharu, Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

- 1. Apakah saudara mengetahui tentang BPBD Kabupaten Lamandau ?
- 2. Apakah yang anda ketahui mengenai BPBD Kabupaten Lamandau?
- 3. Apakah saudara merasa BPBD Kabupaten Lamandau diperlukan ?
- 4. Apakah harapan saudara dengan adanya BPBD di Kabupaten Lamandau?

JAWAB :

- 1. Ya.
- 2. BPBD adalah Instansi pemerintah yang membidangi masalah kebencanaan dan sejenisnya.
- 3. Ya sangat diperlukan karena membidangi masalah bencana sehingga untuk mengatasi masalah bencana dapat segera diatasi.
- 4. Agar bencana-bencana yang terjadi dapat segera diatasi.

PEDOMAN WAWANCARA VII
Counter Information

Narasumber XIII : Masyarakat

Identitas :

- a. Tingkat Pendidikan : S-1
- b. Jabatan/Pekerjaan : PNS
- c. Alamat : Jl. Perumahan Bukit Hibul, Nanga Bulik Kab. Lamandau

- 1. Apakah saudara mengetahui tentang BPBD Kabupaten Lamandau ?
- 2. Apakah yang anda ketahui mengenai BPBD Kabupaten Lamandau?
- 3. Apakah saudara merasa BPBD Kabupaten Lamandau diperlukan ?
- 4. Apakah harapan saudara dengan adanya BPBD di Kabupaten Lamandau?

JAWAB :

- 1. Ya, saya mengetahui tentang BPBD Kabupaten Lamandau.
- 2. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
- 3. BPBD Kabupaten Lamandau sangat diperlukan karena BPBD bukan hanya mengatasi masalah bencana tetapi BPBD juga melaksanakan kegiatan pencegahan bencana.
- 4. Agar terdapat pencegahan dan sosialisasi tentang kebencanaan yang ada di Kabupaten Lamandau.